



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN
2021**

**BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun Anggaran 2021 dapat kami selesaikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan untuk menyusun laporan kinerjanya. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari enam komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

LKIP ini diharapkan memenuhi mekanisme akuntabilitas Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dalam menyampaikan capaian kinerja serta menjadi perwujudan kewajiban Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2021. LKIP disusun merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024 yang mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 yang diimplementasikan dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2021 ini.

Bandung, 27 Januari 2022

Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan
Jalan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas dan perwujudan tata kelola yang baik, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai salah satu unit kerja di Kementerian PUPR mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kaidah keilmiah tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyusun laporan kinerja untuk melaporkan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada PK 2021, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendukung sasaran program: 1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional melalui indikator kinerja Rating Keselamatan Jalan Nasional berupa kegiatan Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dan kegiatan Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan; 2) Meningkatnya Dukungan Manajemen melalui indikator kinerja Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR berupa kegiatan Layanan Perkantoran, kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dan kegiatan Layanan Sarana Internal.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Anggaran

Kinerja dan tingkat penyerapan keuangan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2021 dilihat berdasarkan laporan aplikasi i-emonitoring Kementerian PUPR per tanggal 18 Januari 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.391.455.000 dari pagu Rp 9.460.457.000 atau mampu menyerap anggaran sebesar 99,27%. Kontribusi terbesar dalam realisasi penyerapan ini adalah kegiatan Layanan

Sarana Internal yang realisasi keuangannya sebesar 99,99%, sementara kontribusi terendah sebesar 98,41% adalah kegiatan Layanan Manajemen Satker.

2. Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output diperoleh dengan cara mengukur dan membandingkan rencana/target output yang ingin dihasilkan berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2021 dengan realisasi output yang mampu dihasilkan dan diwujudkan pada akhir tahun 2021. Dari 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang telah diperjanjikan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat memenuhi semua KRO.

Tabel Capaian Kerja Output BPLJ TA 2021

No.	Output	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
3	EAA 005 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
4	EAC 004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100
5	EAA 002 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100

- Untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, pada Tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 123 layanan teknis dengan 22 layanan teknis berupa tinjauan lapangan dan lainnya yang dilakukan melalui diskusi daring, kalibrasi alat, undangan sebagai narasumber, sedangkan untuk kegiatan layanan teknis PNBPN telah dilakukan 18 kali layanan teknis PNBPN.
- Untuk kegiatan Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan, pada Tahun 2021 telah dilakukan melalui 12 kegiatan Sub Paket Pengembangan Teknologi Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan berupa kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi, penyusunan pedoman, serta kajian-kajian terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.

- Untuk kegiatan Layanan Perkantoran, pada Tahun 2021 telah tercapai 1 layanan yang mencakup pemeliharaan gedung kantor, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menunjang kebutuhan operasional perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker, pada Tahun 2021 telah tercapai 1 layanan yang mencakup administrasi kesatkeran, operasional pimpinan, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan.
- Untuk kegiatan Layanan Sarana Internal, terdapat perbedaan satuan output layanan sarana internal antara dari layanan (Renstra Bina Marga 2020-2024) menjadi unit (RKAKL 2021). Pada Tahun 2021 telah tercapai 1 unit layanan sarana internal mencakup pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.

3. Kendala dan Permasalahan

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2021 yang berdampak pada capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, diantaranya terkait perubahan nomenklatur yang berimplikasi terhadap penyesuaian tata kerja, perencanaan awal RKA dan PK yang belum cukup matang, refocusing dan perubahan anggaran (revisi DIPA), perubahan kebijakan pimpinan yang bersifat direktif berpengaruh terhadap efektivitas kinerja balai, pendistribusian pekerjaan bagi SDM belum berimbang (ketimpangan kuantitas dan kualitas), dan kondisi Pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB sehingga penyerapan tidak mencapai target.

Secara umum target dan sasaran yang telah diperjanjikan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2021 secara pencapaian kuantitas *output* dapat dituntaskan dengan baik, sedangkan secara kualitas output dan anggaran diperlukan rekomendasi strategi dan tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Isu Strategis	4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ	7
2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPLJ	9
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ	12
2.2 Perjanjian Kinerja	13
2.3 Metode Pengukuran	16
Target Tahun ini Menurut RENSTRA	18
2.4 Target Kinerja BPLJ	19
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	21
3.1 Sumber Daya Manusia	21
3.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21
3.1.2 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	24
3.2 Sarana Prasarana	26
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	31
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
4.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi	49
4.3 Realisasi Anggaran	50
BAB 5 PENUTUP	54
5.1 Permasalahan	54

5.2 Rekomendasi	55
LAMPIRAN.....	IX

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024).....	10
Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024).....	10
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Parameter BPLJ Tahun 2021	13
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan, Output dan Kegiatan 2021 BPLJ.....	14
Tabel 2.5 Pengukuran Indikator Kinerja 2021 BPLJ.....	18
Tabel 2.6 Target Renstra BPLJ Tahun 2020-2024.....	18
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024).....	19
Tabel 3.1 Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	27
Tabel 3.2 Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2021	32
Tabel 4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	33
Tabel 4.2 Output Pengembangan Teknologi BPLJ 2021	36
Tabel 4.3 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir	49
Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra.....	49
Tabel 4.5 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2021	51
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Satker BPLJ TA 2021	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.....	4
Gambar 2.1 Peta Strategi Renstra BPLJ	11
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2021	16
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2021	16
Gambar 3.1 SDM PNS Berdasarkan Gender	22
Gambar 3.2 SDM PNS Berdasarkan Golongan	22
Gambar 3.3 SDM PNS Berdasarkan Usia	23
Gambar 3.4 SDM PNS Berdasarkan Pendidikan	23
Gambar 3.5 SDM PNS Berdasarkan Jabatan.....	24
Gambar 3.6 SDM Non PNS Berdasarkan Gender	24
Gambar 3.7 SDM Non PNS Berdasarkan Usia.....	25
Gambar 3.8 SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan	25
Gambar 3.9 SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan	26
Gambar 4.1 Dokumentasi Layanan Teknis BPLJ	34
Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi BPLJ	40
Gambar 4.3 Paket Pemeliharaan dan Pegecatan Gedung	42
Gambar 4.4 Belanja Sehari-hari Perkantoran	43
Gambar 4.5 Dokumentasi Paket Pengadaan Pendukung Perkantoran.....	44
Gambar 4.6 Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan	48
Gambar 4.7 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2021	52
Gambar 4.8 Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2021	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah instrumen yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap unit kerja dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan Laporan kinerja mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan dilaporkan secara periodik dan melembaga.

Selain itu, dalam upaya memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Instansi Pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai Unit Eselon III yang berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dibawah Direktorat Jenderal Marga Kementerian PUPR berkewajiban membuat LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, LKIP ini berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada kinerja Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan dan sasaran menjadi acuan bagi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan kedalam Penetapan Kinerja (PK), serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKIP menjadi dokumen untuk mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja serta tolak ukur bagi organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan bidang jalan dan jembatan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 124 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2021, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- b. Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- c. Pelaksanaan uji laboratorium lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- e. Pengembangan sistem monitoring bidang struktur dan perkerasan dan lingkungan jalan; dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, urusan rumah tangga Balai dan koordinasi dengan instansi terkait serta komunikasi publik.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan

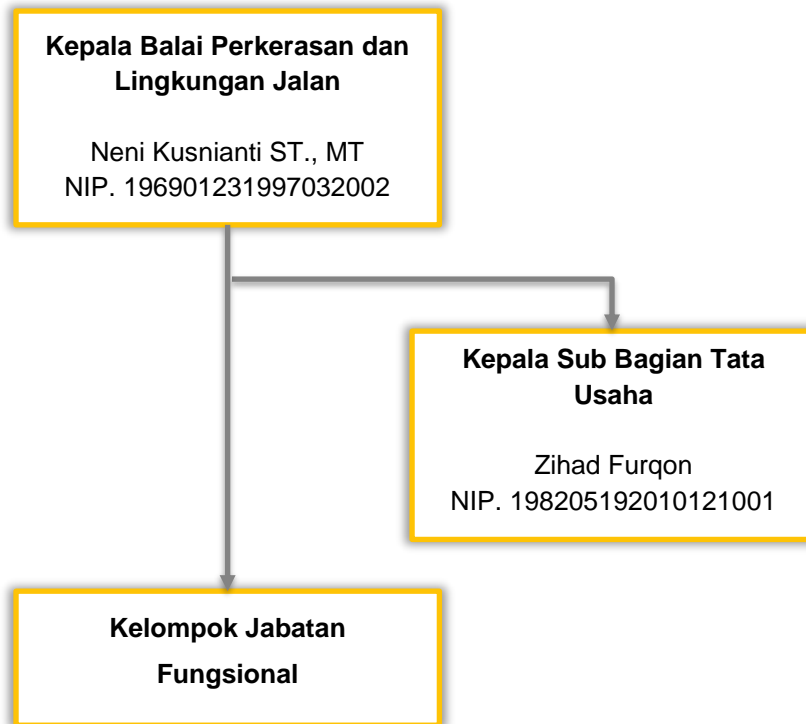
yang berlaku. Dalam melakukan tugas jabatan fungsional, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh 2 (dua) sub koordinator; (1) bidang pengembangan dan penerapan; (2) bidang layanan teknis. Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan untuk menjembatani mekanisme kerja organisasi kepala balai ke kelompok jabatan fungsional. Sub koordinator juga bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Sebagai manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka disusun: i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penjabaran struktur organisasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi seluruh unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawahnya. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh 2 (dua) sub koordinator; (1) bidang pengembangan dan penerapan; (2) bidang layanan teknis. Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan untuk menjembatani mekanisme kerja organisasi kepala balai ke kelompok jabatan fungsional. Sub koordinator juga bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ), terletak di lingkungan kampus Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Jalan A.H. Nasution No. 264, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. BPLJ merupakan sebuah balai teknik baru yang muncul akibat perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan berperan dalam penyediaan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis terhadap *stakeholders* internal, terutama unit kerja di Direktorat Jenderal

Bina Marga seluruh Indonesia dan eksternal terkait bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei. Sejalan dengan pemenuhan tugas dan fungsinya, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tentunya menghadapi tantangan masing-masing, baik internal maupun eksternal dalam upaya pemenuhan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Tantangan internal yang dimaksud adalah berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas manajemen birokrasi yang profesional dan akuntabel, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. Isu yang berkembang tidak lepas dari permasalahan perubahan nomenklatur (reorganisasi), sumber daya manusia (kompetensi) dan anggaran (*refocusing*) akibat pandemi Covid-19, serta kondisi geografis, seperti bencana alam dan perubahan iklim.

Lebih lanjut, secara eksternal, isu-isu strategis dalam upaya peningkatan konektivitas jaringan jalan nasional yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Total Panjang jaringan jalan saat ini mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km.

Permasalahan terlihat dari kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

2. Ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

3. Over dimension dan over loading (ODOL) menjadi isu tersendiri. Hal ini terkait dengan penurunan kondisi kemantapan jalan bisa tidak terhindarkan, yang mana berbanding lurus dengan penurunan aspek keselamatan akibat keberadaan jalan rusak dan kendaraan ODOL. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan secara terpadu lima pilar keselamatan jalan perlu dilakukan meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.

Ketersediaan jalan yang berkeselamatan perlu berfokus pada peningkatan kinerja jalan melalui upaya memenuhi kelaikan fungsi jalan nasional yang telah beroperasi, dengan menginventarisasi kebutuhan teknis jalan dari segi geometrik, perkerasan, perlengkapan, dan bangunan pelengkap jalan agar memastikan jalan berkeselamatan secara teknis dan memberi kepastian hukum dari penyelenggara dan pengguna jalan sehingga jalan dapat dioperasikan untuk umum.

4. Di daerah perkotaan, terjadi penurunan daya dukung kawasan dan infrastruktur perkotaan. Tingkat urbanisasi dan perluasan wilayah perkotaan yang tinggi, menjadi masalah utama karena tidak disertai dengan kemampuan kota dalam menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan standar. Sejumlah kota besar tidak mampu menyediakan rasio luas jalan terhadap luas area yang memadai sebagaimana yang tersedia di sejumlah kota di negara maju, yaitu hingga 20% dari luas area. Akibatnya, kemacetan lalu lintas menjadi hal yang biasa ditemui di sejumlah kota besar di Indonesia, dengan kecepatan rata-rata kendaraan di jalan perkotaan pada jam sibuk sudah kurang dari 20 km/jam. Sebagai contoh, di wilayah Jabodetabek kecepatan rata-rata kendaraan hanya sekitar 5 km/jam, Bandung 12 km/jam, dan Surabaya 11 km/jam.
5. Upaya pembangunan fisik dan ekonomi yang selama ini dilakukan juga memiliki konsekuensi logis terhadap penurunan kondisi lingkungan di Indonesia. Laju deforestasi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Meskipun sejak tahun 2000 hingga sekarang laju deforestasi di Indonesia terus melambat (menjadi sekitar 0,5 juta Ha/tahun), luas hutan Indonesia sudah berkurang hingga lebih dari 73 juta Ha sejak tahun 1950. Maka, tidak mengherankan apabila Indonesia kerap dilanda banjir ketika musim penghujan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ

2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut:

VISI (Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR yang andal, responsif, inovatif dan profesional dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI (Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian PUPR kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian PUPR yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan mendapatkan amanah untuk meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan

pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing dengan sasaran strategis meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km). Sehingga misi Direktorat Jenderal Bina Marga dirumuskan sebagai berikut:

Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

M.1 Meningkatkan KONEKTIVITAS dan PELAYANAN jalan nasional;

M.2 Meningkatkan EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN jalan nasional;

Adapun penjabaran dari misi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020–2024 adalah:

1. Misi 1 (M.1) merupakan misi yang berkaitan dengan komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyediakan konektivitas dan pelayanan jalan nasional. Konektivitas merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia 2020–2024 yang melalui RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional melalui indikator waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau menjadi minimal 1,9 jam per 100 km. Sedangkan pelayanan jalan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 37 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi: aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan.
2. Misi 2 (M.2) merupakan misi internal (yang menjadi institution concern) berkaitan dengan upaya dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meningkatkan kemampuannya (secara andal, profesional, inovatif, dan berintegritas) dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan nasional secara efektif dan efisien. Dimana cakupan kegiatan penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020–2024 terdiri dari 4 (empat) butir sebagai berikut:

1. Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Adapun sasaran strategis Ditjen Bina Marga tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
 - a. Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan nasional;
 - b. Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol; dan
 - c. Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas manajemen birokrasi yang professional dan akuntabel, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan tugas teknis lainnya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPLJ

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kaidah keilmiah tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei.

Pada tahun 2020–2024, program kegiatan di BPLJ bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Ditjen Bina Marga dengan:

1. Melakukan peningkatan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan dalam mengatur dan membina penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan
2. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas manajemen birokrasi Ditjen Bina Marga.

Sasaran kegiatan BPLJ merupakan penjabaran dari tujuan sebagai ukuran tercapainya hasil (output) kegiatan dalam periode lima tahun ke depan (2020–2024). Untuk dapat memenuhi kebutuhan stakeholders dan pengguna layanan dari BPLJ maka dirumuskan sasaran kegiatan BPLJ tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan dengan indikator kinerja dihitung dari jumlah teknologi yang dihasilkan; dan
2. Terlaksananya pengujian laboratorium dan advis teknik dengan indikator tingkat fasilitas 100%.

Sasaran dan indikator kinerja kegiatan BPLJ tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat melalui cascading pada Tabel 2.1. Sedangkan untuk jumlah output dari indikator kinerja kegiatan dirangkum pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024)

SS	IKSS	SP	IKSP	SK	IKK	Output Fisik	Output Non Fisik
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik
			Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)		Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik		
			Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)				
		Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
						Layanan Dukungan Manajemen Satker	
						Layanan Perkantoran	

Keterangan:

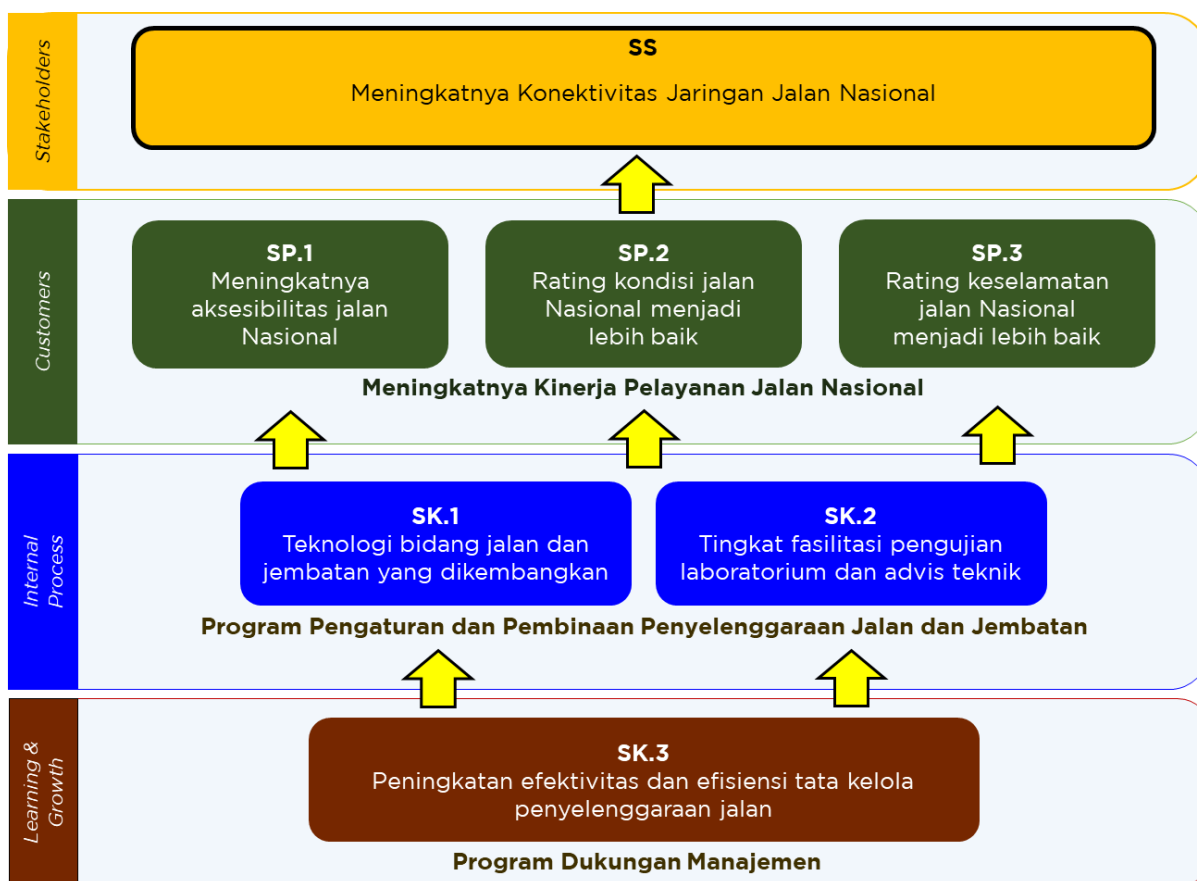
- SS Sasaran Strategis
- IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- SP Sasaran Program
- IKSP Indikator Kinerja Sasaran Program
- SK Sasaran Kegiatan
- IKK Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024)

Indikator Kinerja	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN								
KEGIATAN: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								
1	Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan							
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah	1	1	1	1	1	5
Output	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Output	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik	Dokumen	1	1	1	1	1	5
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan								

Indikator Kinerja	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker							
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
3	Layanan Perkantoran							
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Dalam melaksanakan kegiatan, BPLJ melakukan beberapa pendekatan prespektif dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dalam merumuskan sasaran. Sasaran kegiatan dibagi menjadi 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Strategi Renstra BPLJ

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ

BPLJ akan mendukung secara penuh strategi implementasi dari arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk periode 2020 hingga 2024. Arah kebijakan dan strategi BPLJ adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan
Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi yang dilakukan untuk mendukung direktorat-direktorat di Ditjen Bina Marga di bidang perkerasan dan lingkungan jalan. Kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di BPLJ adalah:
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM dalam pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
 - 2) Pemenuhan SDM dengan jabatan fungsional perekayasa untuk menunjang kegiatan keperekayasaan bidang perkerasan dan lingkungan jalan
 - 3) Peningkatan kerjasama dengan perusahaan, universitas, atau instansi lain yang bergerak di bidang iptek perkerasan dan lingkungan jalan
 - 4) Penyusunan kajian kebijakan untuk mendukung penyusunan NSPK di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
 - 5) Pelaksanaan kajian kesiapterapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan untuk nya di Indonesia
 - 6) Pelaksanaan kliring teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
- b. Pelaksanaan layanan teknis
Layanan teknis BPLJ meliputi penilaian kualitas konstruksi, pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, dan mitigasi bencana di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survei atau inspeksi serta layanan pengujian laboratorium untuk mendukung balai pelaksana jalan. Kegiatan layanan teknis dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Penilaian kualitas konstruksi melalui penyediaan pengujian dan kalibrasi baik di laboratorium maupun di lapangan;
 - 2) Pelaksanaan advis teknis terkait permasalahan di lapangan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan;
 - 3) Penyusunan rekomendasi teknis untuk kajian permasalahan di lapangan yang mendalam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan; dan
 - 4) Pelaksanaan mitigasi bencana alam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan.
- c. Penerapan zona integritas

- 1) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) zona integritas yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penataan Tata Laksana, dan Sekretariat;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai dan stakeholder terkait tentang Zona Integritas; dan
- 3) Penyelenggaraan kegiatan yang bersih dari KKN.

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2021 merupakan perjanjian kinerja baru yang disesuaikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan serta tugas dan fungsi balai. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja menjadi tolak ukur kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian output Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 dibawah ini akan menjelaskan keselarasan *outcome*, output dan kegiatan 2021 di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Parameter BPLJ Tahun 2021

Indikator Kinerja Sasaran Program (Ikp)/ Outcome	Sasaran Kegiatan	Parameter
IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas	Tingkat Kualitas Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik;
IKSP 2 Tingkat Rating Kondisi		2. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan.
IKSP 3 Tingkat Rating Keselamatan		

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan, Output dan Kegiatan 2021 BPLJ

Sasaran Kegiatan	Parameter	Penganggaran 2021	Subdit/ Balai/ Bagian
Tingkat Kualitas Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik;	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Subkoor Layanan Teknis
	2. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan.	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Subkoor Pengembangan dan Penerapan Teknologi
Dukungan Manajemen	Layanan Sarana dan Prasana Internal	a. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Subbag TU
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	a. Layanan PNBP	Subkoor Layanan Teknis
		b. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Subbag TU
		c. Operasional Pimpinan	
		d. Administrasi Kesatkeran	Satker
	Layanan Perkantoran	a. Belanja Uang Lembur	Subbag TU
		b. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	
c. Kebutuhan Operasional Perkantoran			

Sebagai unit organisasi baru, Perjanjian Kinerja (PK) BPLJ Tahun 2021 baru mengalami satu kali perubahan yaitu PK Awal dan PK Revisi. PK Awal ditetapkan pada bulan Januari 2021, sedangkan PK Revisi disusun pada bulan November 2021 setelah adanya perubahan revisi

DIPA BPLJ. Adapun PK Awal dan Revisi dapat dilihat pada

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100 %	100 %
	Parameter <i>Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen
	Rincian Output		
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan		1 Rekomendasi Kebijakan
ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan		1 Rekomendasi Kebijakan	

Kegiatan :

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 13.477.330.000

Bandung, Januari 2021
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian


Neni Kusnianti

Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100 %	100 %
	Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen
	Rincian Output		
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan		1 Rekomendasi Kebijakan
ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan		1 Rekomendasi Kebijakan	

Kegiatan :
1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran
Rp 13.477.330.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Bandung, Januari 2021
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Neni Kusnianti

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100 %	100 %
	Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen
	Rincian Output		
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	- Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	- Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	

Kegiatan :
1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran
Rp 9,460,457,000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Bandung, November 2021
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Hedy Rahadian

Neni Kusnianti

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2021

2.3 Metode Pengukuran

Dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholders dan pengguna layanan BPLJ maka sebagai salah satu persyaratan terciptanya kinerja yang terencana dan terukur, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada setiap tahun anggaran sehingga dapat menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Capaian kinerja setiap indikator kinerja tersebut harus diukur

dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada tiap tahunnya. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan, juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan dan ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

Pengukuran kinerja kegiatan diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut

1. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan dilakukan dengan cara menghitung realisasi output terhadap target capaian setiap indikator di tahun berjalan, serta merubahnya ke dalam persentase untuk mengetahui tingkat pencapaian setiap output tersebut, kemudian dijumlahkan untuk seluruh indikator dan dirata - ratakan. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja keseluruhanyang terdapat pada Renstra Dirjen Bina Marga 2021-2021 dihitung dari rerata persentase indikator:

- a. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan (Jumlah 1);
- b. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik (100%);

Rumus untuk menghitung persentase capaian kinerja keseluruhan adalah sebagai berikut:

$$\sigma = \frac{a + b}{2}$$

Output dari parameter Teknologi Bidang Jalan dan jembatan yang dikembangkan adalah satu (1) dokumen setiap tahunnya yang berisi beberapa kajian kebijakan, rekomendasi teknis, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh Balai Pelaksana Jalan siap untuk diterapkan guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk Parameter tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik, output berupa satu (1) dokumen per tahun dengan rincian beberapa pengujian dan advis teknik yang difasilitasi. Tingkat fasilitasi pelayanan dengan presentase 100% yaitu dengan dasar penilaian adalah sebagai jumlah pengujian dan advis teknik yang direspon oleh BPLJ baik itu diterima maupun ditolak.

2. Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah target dengan jumlah capaian

output, kemudian diubah dalam persentase untuk mengetahui capaian kinerja tersebut. Metode perhitungan untuk setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pengukuran Indikator Kinerja 2021 BPLJ

No	Parameter	Metode Perhitungan
1.	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang diterbitkan dibandingkan dengan target 2021 dikalikan 100%
2.	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase capaian Fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik dibandingkan dengan persentase target tahun 2021

3. Pengukuran kinerja terhadap Output Kegiatan

Pengukuran kinerja terhadap output kegiatan dilakukan dengan membandingkan jumlah output yang dicapai pada tahun anggaran berjalan dengan target keseluruhan Renstra, kemudian diubah menjadi bentuk persentase. Perhitungan capaian output dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Output} = \frac{\text{Capaian Output Tahun Berjalan}}{\text{Target Jumlah Output Keseluruhan}} \times 100\%$$

Target Tahun ini Menurut RENSTRA

Dalam menyusun rencana kinerja tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan Renstra Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2020 -2024, adapun target capaian Renstra pada tahun 2020– 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Target Renstra BPLJ Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Total
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<i>Tingkat Kualitas Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</i>	%	100
	Parameter		
	1. Tingkat Fasilitasi Pengujian Laboratorium dan Advis Teknik	%	100
	2. Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan	Jumlah	5

2.4 Target Kinerja BPLJ

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kegiatan yang dilaksanakan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mengacu pada program Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu Program pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta Program dukungan manajemen. Target kinerja BPLJ merupakan sasaran kegiatan (output) dan indikator kinerja kegiatan yang dirumuskan untuk ikut mendukung tercapainya sasaran program Ditjen Bina Marga telah disajikan pada Tabel 2. Adapun indikator kinerja utama yang berlaku secara internal di BPLJ disusun sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan operasional sehingga memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bond*) disajikan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN							
KEGIATAN: Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
INDIKATOR KINERJA UTAMA: Tingkat Kualitas Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan							
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan kajian teknologi bidang jalan dan jembatan						
<i>Output</i>	Penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan	%	90	90	90	90	90
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik						
<i>Output</i>	Kepuasan pelanggan	%	80	82	85	87	90

Output dari pelaksanaan kajian teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan adalah persentase penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan ke direktorat-direktorat Ditjen Bina Marga, balai pelaksana jalan, dan instansi lain yang terkait dengan perkembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan setiap tahunnya. Perhitungan persentase output diperoleh dari membagi jumlah penyampaian kajian dengan jumlah kajian yang dihasilkan dalam satu tahun. Penyampaian dapat berupa surat penyampaian ke stakeholder yang membutuhkan, pelatihan, sosialisasi yang berisi beberapa kajian teknologi, rekomendasi

kebijakan, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan lingkungan jalan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* terkait khususnya Direktorat Bina Teknik dan Balai Pelaksana Jalan siap untuk diterapkan guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik, output diukur dari persentase kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan BPLJ. Perhitungan persentase kepuasan pelanggan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Dalam menjamin terlaksananya efektivitas dan efisiensi di dalam proses internal balai untuk memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers*, maka diperlukan upaya tata pengelolaan sumber daya melalui proses *learning and growth*, yang meliputi:

1. Peningkatan terhadap layanan sarana dan prasarana internal;
2. Peningkatan terhadap layanan dukungan pelayanan satuan kerja; dan
3. Peningkatan terhadap layanan perkantoran

Layanan sarana dan prasarana internal merupakan kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran seperti rehabilitasi gedung, pembangunan fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan peralatan, mesin, maupun sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi BPLJ. Output dari layanan sarana dan prasarana internal adalah 1 layanan. Layanan dukungan pelayanan satker merupakan kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan serta pelayanan publik berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Output dari layanan ini adalah 1 layanan. Layanan Perkantoran terdiri dari kegiatan pengadministrasian dan pengelolaan gaji/tunjangan, dan honorarium ASN, penggajian pegawai pemerintah non pegawai negeri, serta penyelenggaraan operasional rutin kantor dan pemeliharaan fasilitas. Output dari layanan ini adalah sebanyak 1 layanan selama 12 bulan (1 tahun).

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Sumber daya manusia (SDM) di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dibagi ke dalam beberapa rumpun keahlian, yaitu:

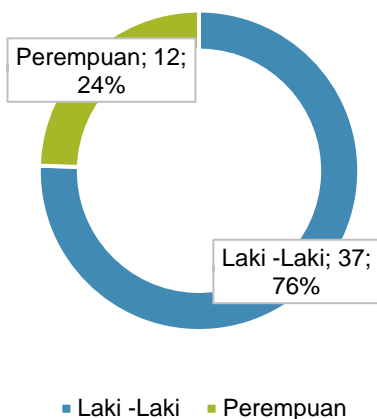
- a. Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan Jalan yang meliputi perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan sistem manajemen perkerasan jalan;
- b. Kelompok Bidang Keahlian Geometrik dan Keselamatan Jalan yang meliputi geometri jalan, keselamatan, dan perlengkapan jalan;
- c. Kelompok Bidang Keahlian Drainase dan Lingkungan Jalan yang meliputi drainase jalan, perizinan UKL/UPL, dan jalan berkelanjutan;
- d. Kelompok Bidang Keahlian Rekayasa lalu lintas yang meliputi analisis beban lalu lintas, kapasitas jalan, dan Faktor-K; dan
- e. Kelompok Bidang Keahlian Teknik Transportasi yang meliputi pembiayaan jalan dan ekonomi transportasi.

Semua rumpun tersebut didukung oleh SDM di bidang instrumentasi sebagai upaya untuk pengembangan alat dan software yang dapat membantu penyelenggara jalan.

3.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

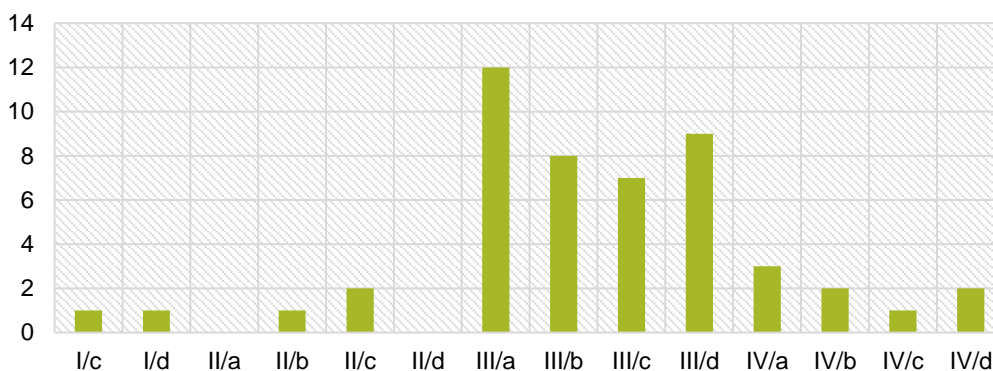
Jumlah PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sampai akhir Tahun 2021 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 (dua belas) orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan golongan pegawai, pegawai BPLJ di dominasi oleh golongan III/a sejumlah 12 (dua belas) orang dan golongan III/d sejumlah 9 (sembilan orang). Data tersebut beserta pengelompokan lainnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

SDM PNS Berdasarkan Gender



Gambar 3.1 SDM PNS Berdasarkan Gender

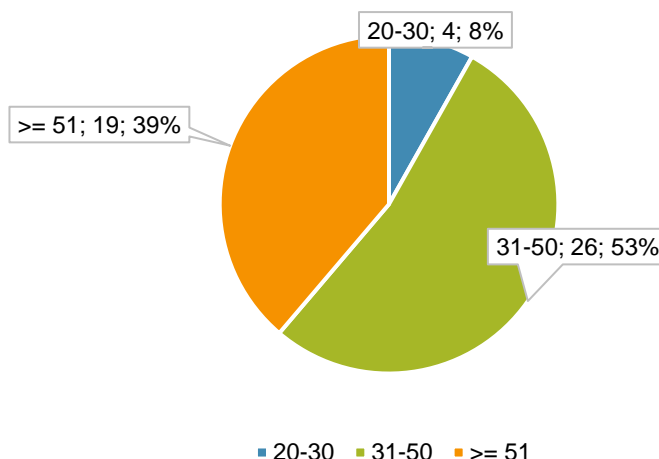
SDM PNS Berdasarkan Golongan



Gambar 3.2 SDM PNS Berdasarkan Golongan

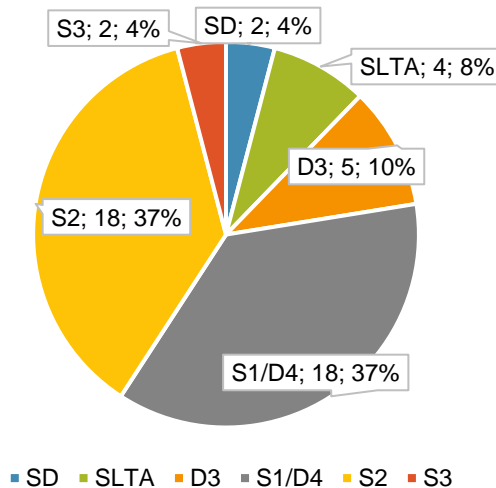
Komposisi PNS berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 3.3. Sedangkan komposisi PNS Tahun 2021 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.4.

SDM PNS Berdasarkan Usia



Gambar 3.3 SDM PNS Berdasarkan Usia

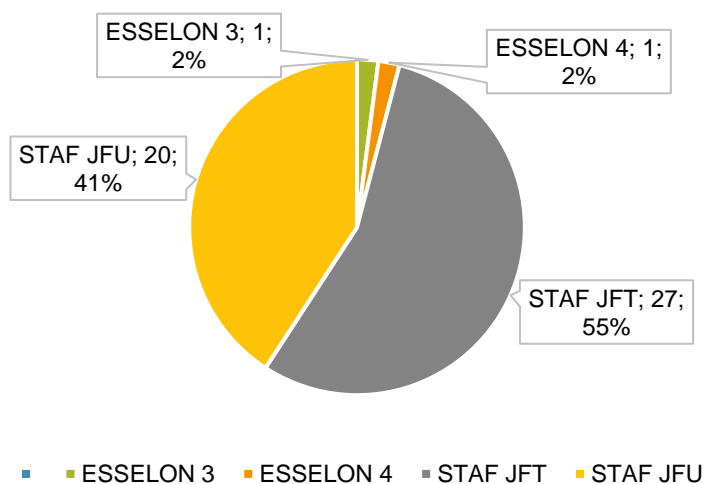
SDM PNS Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.4 SDM PNS Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdiri dari eselon 3 yaitu Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, eselon 4 yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, serta 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Teknis dan 20 (dua puluh) orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Umum. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.5.

SDM PNS Berdasarkan Jabatan

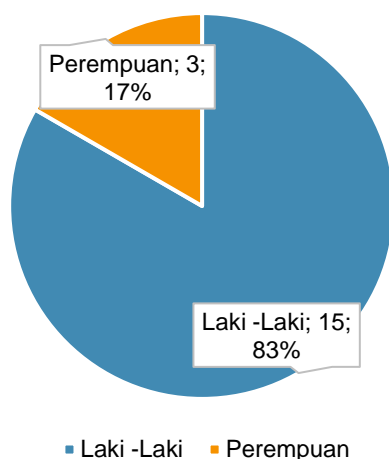


Gambar 3.5 SDM PNS Berdasarkan Jabatan

3.1.2 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

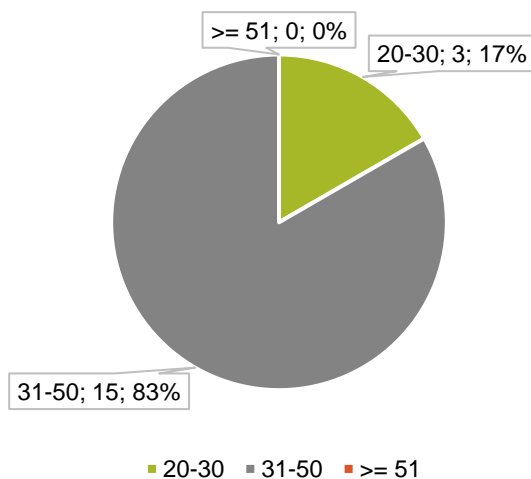
Jumlah Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.6, sedangkan komposisi Pegawai Non-PNS Tahun 2021 berdasarkan usia terdiri dari 3 orang berusia 20-30 tahun (17%), dan 15 orang berusia 31-50 tahun (83%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.7.

SDM Non PNS Berdasarkan Gender



Gambar 3.6 SDM Non PNS Berdasarkan Gender

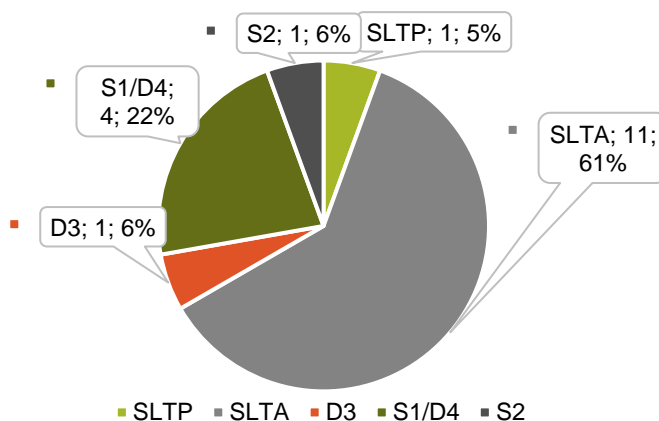
SDM Non PNS Berdasarkan Usia



Gambar 3.7 SDM Non PNS Berdasarkan Usia

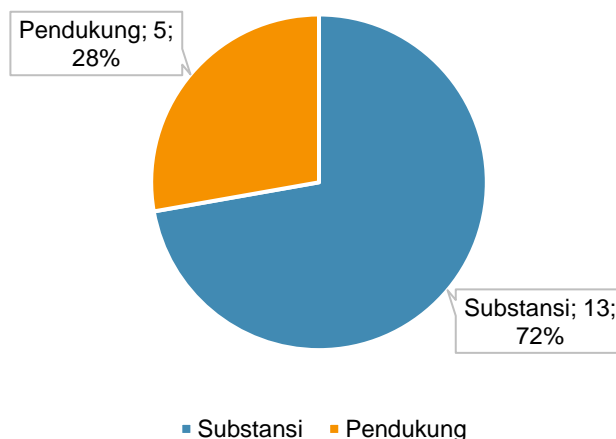
Komposisi Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 1 orang tingkat SLTP, 11 orang tingkat SLTA, 1 orang tingkat D3, 4 orang tingkat S1/D4 dan 1 orang tingkat S2 yang dapat dilihat pada Gambar 3.8 Sedangkan Komposisi Pegawai Non-PNS berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 3.9.

SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.8 SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan

SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan



Gambar 3.9 SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan

3.2 Sarana Prasarana

Aset BMN yang dimiliki Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dari Bulan Januari 2021 – Desember 2021 mencakup akun peralatan dan mesin (kode 132111), konstruksi dalam pengerjaan (kode 136111). Adapun data rincian aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan per bulan Desember dapat dilihat berdasarkan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		0	0	313	2,143,680,327	0	0	313	2,143,680,327
3.03.03	ALAT UKUR		0	0	2	155,562,000	0	0	2	155,562,000
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	0	0	33	164,064,227	0	0	33	164,064,227
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	0	0	184	602,550,500	0	0	184	602,550,500
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	0	0	5	98,341,900	0	0	5	98,341,900
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	0	0	5	6,930,000	0	0	5	6,930,000
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	0	0	3	5,970,000	0	0	3	5,970,000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	0	0	3	17,281,000	0	0	3	17,281,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	0	0	57	1,019,617,700	0	0	57	1,019,617,700
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	0	0	18	63,551,000	0	0	18	63,551,000
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	0	0	2	4,972,000	0	0	2	4,972,000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	0	0	1	4,840,000	0	0	1	4,840,000
TOTAL				0		2,143,680,327		0		2,143,680,327

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		0	0	313	2,143,680,327	0	0	313	2,143,680,327
3.03.03.10.999	Alat Timbangan/Biara Lainnya		0	0	2	155,562,000	0	0	2	155,562,000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	0	0	1	1,738,000	0	0	1	1,738,000
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	0	0	16	65,120,000	0	0	16	65,120,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	0	0	1	8,827,500	0	0	1	8,827,500
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	1	10,010,000	0	0	1	10,010,000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	4	15,378,000	0	0	4	15,378,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	23,870,000	0	0	1	23,870,000
3.05.01.05.039	Display	Buah	0	0	3	18,645,000	0	0	3	18,645,000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	2	9,658,000	0	0	2	9,658,000
3.05.01.05.082	Mesin Fogging	Buah	0	0	3	5,730,000	0	0	3	5,730,000
3.05.01.05.088	Sirine	Buah	0	0	1	5,087,727	0	0	1	5,087,727
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	14	62,975,000	0	0	14	62,975,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	25	75,335,000	0	0	25	75,335,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	97	168,487,000	0	0	97	168,487,000
3.05.02.01.033	Sofa	Set	0	0	2	11,244,000	0	0	2	11,244,000
3.05.02.03.005	Air Cleaner	Buah	0	0	17	42,887,000	0	0	17	42,887,000
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	0	0	3	12,111,000	0	0	3	12,111,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	6	72,545,000	0	0	6	72,545,000
3.05.02.05.006	Oven Listrik	Buah	0	0	3	3,388,000	0	0	3	3,388,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	0	0	5	33,473,000	0	0	5	33,473,000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	0	0	3	21,582,000	0	0	3	21,582,000
3.05.02.06.014	Microphone	Buah	0	0	3	31,205,000	0	0	3	31,205,000
3.05.02.06.023	Timbangan Orang	Buah	0	0	1	3,348,000	0	0	1	3,348,000

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.06.033	Water Filter	Buah	0	0	2	45,672,000	0	0	2	45,672,000
3.05.02.06.045	Coffee Maker	Buah	0	0	2	15,713,500	0	0	2	15,713,500
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	1	2,585,000	0	0	1	2,585,000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	0	0	1	2,134,000	0	0	1	2,134,000
3.06.01.02.135	LCD Monitor	Buah	0	0	1	2,350,400	0	0	1	2,350,400
3.06.01.02.165	Camera Conference	Buah	0	0	1	8,002,500	0	0	1	8,002,500
3.06.01.02.167	Drone	Buah	0	0	1	81,950,000	0	0	1	81,950,000
3.06.01.04.045	Mesin Barcode	Buah	0	0	1	3,905,000	0	0	1	3,905,000
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	5	6,930,000	0	0	5	6,930,000
3.07.01.01.026	Tabung O2	Buah	0	0	3	5,970,000	0	0	3	5,970,000
3.08.01.06.057	Straight Edge	Buah	0	0	2	8,668,000	0	0	2	8,668,000
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	0	0	1	8,613,000	0	0	1	8,613,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	0	0	38	590,817,900	0	0	38	590,817,900
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	0	0	14	349,907,800	0	0	14	349,907,800
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	0	0	5	78,892,000	0	0	5	78,892,000
3.10.02.02.004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	7	16,511,000	0	0	7	16,511,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	5	18,249,000	0	0	5	18,249,000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	3	16,258,000	0	0	3	16,258,000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	3	12,533,000	0	0	3	12,533,000
3.11.01.02.017	Penetrometer (Ukur/instrument)	Buah	0	0	2	4,972,000	0	0	2	4,972,000
3.19.01.02.001	Alat Tennis Meja	Buah	0	0	1	4,840,000	0	0	1	4,840,000
TOTAL				0		2,143,680,327		0		2,143,680,327

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD 1 JANUARI	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH SD 31 DESEMBER	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	611,224,638	0	611,224,638	
7.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	611,224,638	0	611,224,638	
TOTAL		0	611,224,638	0	611,224,638	

Akumulasi penyusutan dan nilai buku atas BMN berupa aset tetap dapat dilihat dibawah ini :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2021			
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
132111	PERALATAN DAN MESIN		313	2.143.680.327	304.028.709	1.839.651.618
3.04.01	Alat Ukur	Buah	2	155.562.000	15.556.200	140.005.800
3.05.01	Alat Kantor	Buah	33	164.064.227	24.205.973	139.858.254
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Set	184	602.550.500	88.949.100	513.601.400
3.06.01	Alat Studio	Buah	5	98.341.900	10.869.480	87.472.420
3.06.02	Alat Komunikasi	Buah	5	6.930.000	693.000	6.237.000
3.07.01	Alat Kedokteran	Buah	3	5.970.000	597.000	5.373.000
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	Buah	3	17.281.000	1.080.063	16.200.937
3.10.01	Komputer Unit	Buah	57	1.019.617.700	152.003.276	867.614.424
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah	18	63.551.000	8.770.750	54.780.250
3.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	Buah	2	4.972.000	497.200	4.474.800
3.19.01	Peralatan Olahraga	Buah	1	4.840.000	806.667	4.033.333
						-
136111	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					
7.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	1	611.224.638		611.224.638

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama Tahun Anggaran 2020, terjadi 4 (empat) kali revisi anggaran. DIPA Awal tahun 2021 adalah pada tanggal 23 November 2020, yang merupakan DIPA pada Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Komposisi DIPA Awal TA.2021 diantaranya RPM sebesar Rp. 11.827.330.000,- dan PNBP sebesar Rp. 1.650.000.000,-. Pagu terakhir Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebesar Rp. 9.460.457.000,- dengan komposisi seluruhnya RPM.

Perubahan DIPA selama Tahun 2021 secara garis besar (revisi-1 sampai dengan revisi-3) dilakukan berdasarkan kebutuhan Dirjen Binamarga melalui refocusing dan realokasi anggaran dalam unit eselon 1. Dalam perjalanannya terdapat kebijakan bahwa Belanja PAGU belanja PNBP tidak dapat dimanfaatkan maka pada revisi-3 PAGU belanja PNBP dihilangkan. Kronologis perubahan anggaran tiap revisi dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2021

NO	DIPA AWAL/ REVISI	PAGU AWAL	JENIS REVISI					+ / -	PAGU AKHIR	KET.
			DJA	KANWIL	POK	DIGITAL STAMP	TANGGAL PENGESAHAN			
1	DIPA Awal	13.477.330.000	V			6110-3980-6796-6653	23/11/2020		13.477.330.000	
2	Revisi ke-1	13.477.330.000	V			8199-8737-2800-0367	17/02/2021	-612.417.000	12.864.913.000	- Perubahan anggaran pada Program Dukungan Manajemen Satuan Kerja Balai Perkerasan dan Lingkungan lalan dalam rangka penghematan belanja untuk mendukung refocusing dan relokasi anggaran Kementerian PUPR TA 2021;
3	Revisi ke-2	12.864.913.000	V			5362-4178-1344-0920	27/08/2021	- 1.425.390.000	11.439.523.000	- Pengurangan anggaran dalam rangka Refocusing dan realokasi belanja kementerian PUPR TA.2021 Tahap IV
4	Revisi ke-3	11.439.523.000	V			1739-7965-1214-6739	04/11/2021	-1.979.066.000	9.460.457.000	- Revisi pengurangan pagu anggaran terkait Pagu belanja PNB - Pengurangan pagu anggaran untuk kebutuhan mendesak Dirjen Binamarga - Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
5	Revisi ke-4	9.460.457.000		V		1739-7965-1214-6739	01/12/2021	Tetap	9.460.457.000	- Optimalisasi anggararan dengan Pergeseran antar keluaran, satu kegiatan, satu satker - Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur capaian kinerja, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menyusun rencana aksi yang dimonitoring melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai bentuk monitoring terhadap pencapaian kinerja dan untuk meninjau hambatan-hambatan kinerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan program. Oleh karena itu, diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 dapat sepenuhnya tercapai. Capaian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2021 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai/diterbitkan/disampaikan dengan target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Tabel 4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN(%)		KET
			PK AWAL	PK REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	100	100	Tercapai
2	ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	100	100	Tercapai
3	EAA 005 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
4	EAC 004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
5	EAA 002 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	100	100	Tercapai

Pada subbab ini dijelaskan mengenai hasil pengukuran kinerja tahun anggaran 2021 serta perbandingannya antara target revisi akhir dengan realisasi. Adapun rincian dari pencapaian Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk TA. 2021 adalah sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja output yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, BPLJ melaksanakan kegiatan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan melalui kegiatan advis teknis, pendampingan teknis, dukungan survei kondisi jalan dan jembatan, kliring teknologi, layanan PNBP, serta layanan lainnya seperti narasumber maupun pembicara/instruktur.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan, pada tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 123 layanan teknis dengan 22 layanan teknis berupa tinjauan lapangan dan lainnya yang dilakukan melalui diskusi daring, kalibrasi alat, undangan sebagai narasumber. Advis teknis yang dilakukan umumnya berupa pengecekan kerusakan jalan, pengujian survei kondisi jalan, serta kalibrasi alat survei. Sedangkan untuk kegiatan layanan teknis PNBP yang telah dilakukan pada tahun 2021, sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember telah dilakukan 18 kali layanan teknis PNBP dengan total nilai PNBP sebesar Rp. 246.652.745. Layanan teknis PNBP tahun ini didominasi oleh pengujian kekesatan jalan sejumlah 13 pengujian di berbagai ruas jalan Tol di Indonesia.



Gambar 4.1 Dokumentasi Layanan Teknis BPLJ

Manfaat Kegiatan:

- Membantu menyelesaikan permasalahan bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan di BB/BPJN seluruh Indonesia baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun saat jalan tersebut telah beroperasi, sehingga secara teknis, penyelenggaraan jalan tersebut dapat melayani pengguna dengan baik
- Membantu stakeholder dalam melakukan survey/pengujian perkerasan jalan dalam rangka pemenuhan parameter perkerasan jalan yang dipersyaratkan.

Kendala Kegiatan:

- Adanya pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan layanan adtek umumnya masih banyak terdapat keterbatasan
- Keterbatasan SDM yang memiliki level kompetensi teknis yang lebih tinggi.
- Banyaknya undangan pembahasan online terkait layanan teknis dengan permasalahan tipikal dan pada level yang belum membutuhkan keterlibatan Balai Teknik

Alternatif solusi/Pemecahan masalah/Langkah antisipatif:

- Penatausahaan kegiatan layanan teknis yang lebih baik dengan penyempurnaan SOP yang sudah ada
- Peningkatan kompetensi teknis SDM BPLJ melalui pelaksanaan Inhouse training substansi teknis bidang perkerasan dan lingkungan jalan.
- Penyusunan keseragaman SOP Layanan Teknis dari Ditbintek yang berlaku di Lingkungan DJBM (menunggu pengesahan)
- Sebagai langkah antisipatif diperlukan tinjauan-tinjauan lapangan pada proyek-proyek strategis yang sedang berjalan sehingga kondisi-kondisi lapangan yang berpotensi terjadi kesalahan dapat dilakukan langkah-langkah korektif

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kerja.

- Sudah adanya Kelompok Bidang Keahlian yang merupakan penugasan dari Bapak Dirjen, sehingga pembahasan terkait permasalahan teknis lapangan dilakukan oleh tim/personil yang benar-benar kompeten.
- Adaanya keterbatasan SDM dan beberapa penugasan pimpinan (kecenderungan overload), sehingga terjadi keterbatasan dalam tingkat layanan

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

- Tingkat permasalahan lapangan yang terjadi di BB/BPJM perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Kompetensi masing-masing sebelum masuk ke Ditbintek/Balai Teknik
- Apabila kondisi pandemik telah membaik, akan dilakukan tinjauan lapangan yang lebih intens terutama pada proyek-proyek strategis (sebagai langkah preventif) untuk memetakan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi di lapangan.
- Penentuan prioritas layanan

2. Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan

Pembinaan teknik bidang jalan dan jembatan di lingkungan BPLJ dilakukan melalui kegiatan Sub Paket Pengembangan Teknologi Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan berupa kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi, penyusunan pedoman, serta kajian-kajian terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan. Output pembinaan teknik bidang jalan dan jembatan di BPLJ TA. 2021 yang dikeluarkan dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Output Pengembangan Teknologi BPLJ 2021

No	Sub Paket Pengembangan Teknologi Bidang Perkerasan Jalan	Output
1	Review Parameter model kerusakan jalan untuk IRMS dan Kajian Teknis Road User Cost	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan kajian teknis mengenai validasi model kerusakan perkerasan jalan 2) Pengkinian BOK dasar dan nilai waktu, 3) Pengembangan aplikasi Software Desain Perkerasan Jalan (SDPJ).
2	Penyusunan Desain Perkerasan untuk Test Track	Dokumen perancangan teknis/ Detail Engineering Design (DED) perkerasan jalan untuk test track.
3	Implementasi Program BackCalc untuk Evaluasi Struktur Perkerasan Jalan Berbasis Web	Purwarupa Bengkelmen Beam Digital
4	Pengembangan Sistem Manajemen Drainase Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Draft pedoman drainase (R0), yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi Drainase Jalan b. Inspeksi Drainase Jalan (Rutin & Khusus) c. Program Penanganan dan Estimasi Harga Satuan Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Jalan 2) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Drainase Jalan (SIMDJ) yang siap digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi Drainase Jalan b. Inspeksi Cara Cepat Drainase Jalan c. Inspeksi Drainase Jalan (Rutin & Khusus) d. Program Penanganan dan Estimasi Harga Satuan Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Jalan 3) Laporan hasil pendampingan/sosialisasi aplikasi SIMDJ di lingkungan penyelenggara jalan (Direktorat Jenderal Bina Marga);

5	Penyusunan Pedoman Limbah B3	Draf pedoman dan draf naskah ilmiah pengelolaan pemanfaatan LB3 dan LnB3 untuk bidang jalan
6	Penyusunan Pedoman Kalibrasi WIM	Pedoman kalibrasi sistem WIM.
7	Pengkinian Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)	Program dan manual program perhitungan PKJI.
8	Validasi Manual Desain Geometrik Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kajian tambahan untuk melengkapi Pedoman Desain Geometrik Jalan (PDGJ) <ol style="list-style-type: none"> a. Desain persimpangan sebidang jalan b. Desain persimpangan tidak sebidang jalan c. Analisis risiko desain geometric jalan d. Desain gerbang tol menuju Multi Lane Free Flow 2) Kajian mitigasi desain pada alinemen vertical dengan kelandaian >10%.
9	Faktor Penyesuaian Data Latu Lintas (Faktor K)	Nilai Faktor Penyesuaian (Hari, Bulan, Tahun)
10	Kaiian Teknis Ibu Kota Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kriteria teknis 2) Naskah ilmiah desain kriteria jalan IKN.
11	Kajian Teknis KPBU (Hukum Kontrak)	Manual Manajemen Proyek (MMP) Preservasi Jalan (Umum) dengan konsep KPBU-AP.
12	Validasi Roughness Meter	Alat pengukur ketidakrataan berbasis geophone dan GPS.

Manfaat Kegiatan:

Kegiatan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan oleh BPLJ bermanfaat untuk menjawab isu-isu dalam bidang perkerasan dan lingkungan jalan terutama yang telah tertuang dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2019-2024. Berikut manfaat kegiatan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan BPLJ pada TA. 2021.

- Mendukung efektivitas dan efisiensi pemrograman jalan saat tahap perencanaan maupun evaluasi melalui pengembangan *software* desain perkerasan jalan dan metode perhitungan balik perkerasan jalan untuk mengevaluasi kondisi perkerasan jalan
- Memperkuat bukti empiris perhitungan-perhitungan teknis yang diadopsi dari luar melalui rencana penerapan *test track* yang mengambil data riil dan faktual di lapangan.
- Meningkatkan efisiensi program preservasi jalan melalui tindakan yang bersifat preventif yaitu dengan meningkatkan sistem manajemen drainase untuk menurunkan potensi percepatan kerusakan jalan akibat genangan air yang tidak tersalurkan.
- Mendukung komitmen pemerintah dalam bidang lingkungan dengan memanfaatkan limbah B3 pada infrastruktur jalan, dengan harapan penurunan pencemaran

lingkungan akibat limbah B3, serta penyusunan kriteria teknis untuk ibukota negara yang didasarkan pada interaksi lingkungan dengan manusia.

- Meningkatkan ketepatan sasaran program jalan dan jembatan melalui panduan teknis dalam perencanaan maupun evaluasi infrastruktur jalan, terutama penggunaan sistem WIM untuk mengumpulkan data beban lalu lintas yang menjadi data masukan dalam desain perkerasan jalan, penggunaan MKJI dalam desain geometri jalan (terkait kapasitas jalan), dan faktor penyesuaian yang mempertimbangkan nilai ekonomis dalam melakukan estimasi besaran permintaan lalu lintas yang perlu diakomodasi oleh perencana jalan dan jembatan.
- Meningkatkan keselamatan jalan melalui panduan perencanaan/desain geometri jalan yang berlandaskan keselamatan jalan dengan pertimbangan lain seperti aspek ekonomi, lingkungan, dan lainnya.
- Mendukung pemrograman infrastruktur jalan melalui skema sistem kontrak yang melibatkan badan usaha.
- Mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pengembangan alat ukur kondisi jalan yang dapat dikembangkan oleh putra bangsa.

Kendala Kegiatan

Reorganisasi di Kementerian PUPR yang menghilangkan Badan Litbang menyebabkan perlunya waktu penyesuaian bagi unit-unit organisasi di PUPR baik yang bersifat teknis maupun administratif. Dari segi teknis, reorganisasi tersebut menyebabkan masih terdapatnya ketimpangan sumber daya pada tiap-tiap unit organisasi. Sedangkan dari segi administratif, reorganisasi menyebabkan diperlukannya aturan-aturan turunan baru yang disesuaikan dengan tiap unit pelaksana teknis.

Alternatif solusi/Pemecahan masalah/Langkah antisipatif

Penyusunan nomenklatur yang lebih rinci dan spesifik, serta sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap unit-unit di bawah unit organisasi. Penyusunan nomenklatur tersebut antara lain:

- Analisis jabatan yang didasarkan pada tugas dan fungsi organisasi dan luaran berupa kebutuhan sumber daya unit pelaksana teknis.
- Penyusunan struktur organisasi sesuai tugas dan fungsi unit pelaksana teknis yang diturunkan dari nomenklatur tingkat kementerian dengan landasan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berupa akuntabilitas dan transparansi kegiatan pengelolaan institusi pemerintahan.

- Penempatan personil pada struktur organisasi dengan kualifikasi yang sesuai untuk tiap jabatan.
- Menetapkan jabatan dan penempatan tiap personil balai dengan ukuran kinerja terhadap tiap personil dalam bentuk sistem pengukuran pegawai (SKP) dengan pendistribusian yang tepat dan proporsional.
- Menyusun sistem pengelolaan unit pelaksana teknis yang menjaga kualitas dan ketepatan sasaran dengan menjaga ketertiban administrasi melalui sistem monitoring dan evaluasi balai.

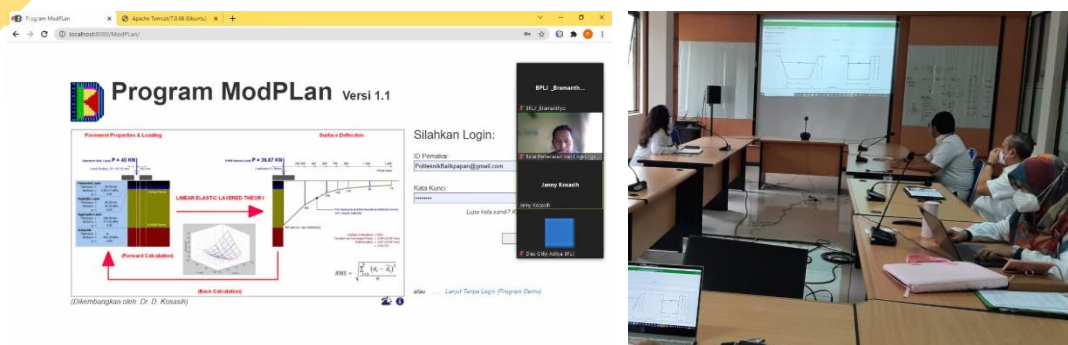
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kerja.

Penyusunan struktur dan kinerja organisasi masih dalam evaluasi secara berkelanjutan hingga saat ini. Beberapa catatan yang perlu dievaluasi antara lain:

- Pendistribusian pekerjaan yang masih belum berimbang dikarenakan ketimpangan kuantitas dan kualifikasi personil terutama dalam bidang keteknikan.
- Pemenuhan tugas dan fungsi balai yang menuntut adanya kompetensi-kompetensi keteknikan lain, selain yang telah dimiliki oleh balai.
- Perubahan nomenklatur yang berimplikasi terhadap tata kerja balai yang masih memerlukan penyesuaian praktik pelaksanaannya, terutama dalam hal yang bersifat administratif.

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya

- Mengadakan secara intensif dan reguler kegiatan seperti *in house training* untuk personil balai dengan tujuan pemerataan kualifikasi tiap-tiap personil.
- Meningkatkan pengetahuan personil terhadap bidang-bidang di luar kualifikasinya melalui diklat, vokasi, maupun penggunaan tenaga bantuan pihak luar yang berkompeten pada bidang terkait untuk menjawab isu-isu yang terjadi.
- Penajaman kembali nomenklatur balai dengan prosedur kerja yang lebih rinci sesuai lingkungan balai, dengan sistem monitoring pelaksanaannya yang lebih baik dan dievaluasi secara berkala.



Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi BPLJ

B. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

1. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencakup Belanja Uang Lembur (PH), Operasional Perkantoran (PJ), dan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana (PI) untuk melayani kebutuhan balai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi. Target Output Layanan Perkantoran pada Tahun 2021 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi pencapaian kegiatan Layanan perkantoran pada Tahun 2021 telah tercapai 1 layanan karena telah melakukan layanan pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan, menunjang kebutuhan operasional perkantoran yang sesuai dengan anggaran selama periode waktu satu tahun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Kegiatan operasional perkantoran meliputi :

1. Belanja Belanja Keperluan Perkantoran meliputi belanja sehari-hari perkantoran, kebutuhan air minum mineral, jamuan rapat, hidangan tamu.
2. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, meliputi pembayaran honorarium (KPA, PPK, Penguji dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, staf keuangan.
3. Belanja Barang Operasional Lainnya, meliputi pembayaran honor lembur PPNPN.
4. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, meliputi pengadaan belanja barang berupa Alat Tulis Kantor

Adapun Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana yang dapat diakomodir diantaranya:

1. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan,
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dan

3. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Manfaat Kegiatan:

- Operasional Perkantoran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran dalam menunjang kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan
- Pemeliharaan dilakukan untuk kelayakan dan kenyamanan pegawai dalam mengemban tugasnya, terutama didalam bangunan dan Gedung di lingkungan kantor. Pemeliharaan juga dilakukan pada kendaraan operasional sebagai fasilitas pendukung dalam pekerjaan di dalam maupun diluar kantor. Sehingga mobilisasi pegawai terjamin aman, layak dan nyaman.

Kendala Kegiatan:

Kondisi bangunan/Gedung, peralatan perkantoran/survei, dan kendaraan operasional yang digunakan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan merupakan limpahan aset dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Kondisi yang didapat sebagian besar masih dapat digunakan akan tetapi dari segi kenyamanan dan kelayakan kurang optimal, sehingga diperlukan pemeliharaan secara besar-besaran. Pada tahun anggaran 2021 tidak semua asset dapat dilakukan pemeliharaan secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan anggaran, kondisi pandemi, dan waktu yang terbatas akibat penggunaan asset yang menerus. Dalam pelaksanaan pemeliharaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi selain kondisi yang disebutkan sebelumnya, diantaranya:

- Kesulitan identifikasi kerusakan asset (bangunan/Gedung, peralatan kantor, Kendaraan) dikarenakan kondisi asset sudah lama. Sehingga setelah perbaikan tahap awal selesai, dan beberapa waktu setelahnya baru di temukan kerusakan-kerusakan yang lainnya dan membutuhkan perbaikan selanjutnya.
- Kondisi asset kendaraan dengan mobilitas tinggi sehingga dalam pemeliharanya kurang optimal, karena kerusakan yang ditimbulkan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dibatasi pekerjaan perbaikan tersebut.
- Kondisi asset bangunan/gedung yang terdapat beberapa penurunan kondisi akibat tanah dasar, sehingga hasil dari pemeliharaan sebelumnya terjadi kerusakan kembali. Oleh karena itu membutuhkan renovasi secara menyeluruh dan berdampak pada anggaran Modal yang terbatas dan dapat mengganggu kenyamanan pegawai pada saat rehab bangunan Gedung tersebut.
- Banyaknya undangan pembahasan online terkait layanan teknis dengan permasalahan tipikal dan pada level yang belum membutuhkan keterlibatan Balai Teknik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran meliputi :

- Pengurangan anggaran akibat refofusing, sehingga kebutuhan sehari-hari perkantoran tidak terpenuhi secara optimal;
- Keterlambatan pembayaran honor operasional satker karena pemberlakuan jadwal WFH 100%;
- Absensi masih menggunakan aplikasi online sehingga waktu pelaksanaan lembur pegawai PPNP tidak akurat;
- Kebutuhan Alat Tulis Kantor tidak terpenuhi secara optimal karena pengurangan pagu akibat refofusing.

Alternatif solusi/Pemecahan masalah/Langkah antisipatif:

- Perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin untuk seluruh asset agar kondisi dapat terjaga mengingat umur dari asset yang sudah lama

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kerja.

- Dalam pelaksanaannya tidak seluruh asset dapat dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi kerusakannya, karena keterbatasan berbagai kondisi. Meski demikian asset tersebut masih dapat digunakan untuk kebutuhan seluruh pegawai dalam menunjang tugas dan fungsinya.
- Perubahan jadwal WFH dan WFO yang berubah-ubah berdasarkan surat edaran Sekjen Kementerian PUPR sehingga kebutuhan sehari-hari perkantoran tidak sesuai rencana yg diusulkan dalam setahun.

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

- Melakukan pengecekan kondisi struktur bangunan/Gedung kepada pihak yang berkompeten untuk mengetahui kondisi dan biaya yang harus dikeluarkan sebagai dasar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.



Gambar 4.3 Paket Pemeliharaan dan Pengecatan Gedung



Gambar 4.4 Belanja Sehari-hari Perkantoran

2. Layanan Sarana Internal

Output Layanan Sarana internal mencakup pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. Target Output dari kegiatan ini adalah 1 (satu) unit dalam satu tahun anggaran. Terdapat perbedaan satuan output layanan sarana internal antara Renstra Bina Marga dan RKAKL. Pada Renstra Bina Marga 2020-2024 satuan output layanan sarana internal adalah 1 (satu) layanan dalam 1 (satu) tahun anggaran, namun pada realisasinya satuan yang digunakan adalah unit. Realisasi output layanan sarana internal Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2021 tercapai 1 (satu) unit dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan ini terdiri dari :

1. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, yang digunakan untuk Renovasi dari Area workshop Lab BPLJ yang berada di gedung Ir. Mudjitaba, Renovasi Musholla dan Toilet Gedung Lab.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti pengadaan perangkat pendukung ruang rapat, kursi kerja, personal komputer dan laptop, AC ruang kerja

Manfaat Kegiatan:

- Tersedianya Peralatan yang dapat menunjang kinerja dari tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Kendala Kegiatan:

- Peralatan ataupun fasilitas perkantoran yang digunakan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan merupakan limbah aset dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Kondisi peralatan sebagian besar masih dapat digunakan akan tetapi dari segi kinerja untuk alat ataupun kelayakan dari fasilitas perkantoran kurang optimal, sehingga diperlukan pengadaan untuk peralatan maupun renovasi pada fasilitas.

Alternatif solusi/Pemecahan masalah/Langkah antisipatif:

- Pengadaan Perangkat pendukung kegiatan di BPLJ ini dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kerja.

- Sulitnya penentuan mana yang akan dijadikan prioritas untuk diimplementasikan pada tahun anggaran 2021.
- tidak seluruh fasilitas perkantoran bisa di tingkatkan karena keterbatasan berbagai kondisi baik dari perencanaan maupun dari anggaran.

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

- Pengoptimalan anggaran dan prioritas kegiatan dengan tidak mengurangi kinerja Pimpinan



Gambar 4.5 Dokumentasi Paket Pengadaan Pendukung Perkantoran

3. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Output Layanan Dukungan Manajemen Satker mencakup Administrasi kesatkeran, operasional pimpinan, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Target Output dari kegiatan ini adalah layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi output layanan Dukungan Manajemen Satker adalah 1 Layanan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kegiatan administrasi kesatkeran dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi, lancar administrasi dan mudahnya ketelusuran administrasi dalam pelaksanaan penarikan anggaran untuk kegiatan paket kontraktual dan kegiatan swakelola di Satker Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Paket ini terdiri dari enam akun belanja yang terdiri dari:

1. Belanja bahan yang meliputi makan rapat biasa dan snack rapat biasa

2. Belanja honor output kegiatan yang diperuntukkan untuk pembayaran honorarium pejabat pengadaan dan penanggung jawab E-monitoring.
3. Belanja barang persediaan barang konsumsi yang diperuntukkan untuk pengadaan bahan atk computer
4. Belanja sewa yang digunakan untuk sewa peralatan perkantoran
5. Belanja perjalanan dinas biasa yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan dinas luar kota, penginapan dan transportasi.
6. Belanja perjalanan dinas dalam kota yang diperuntukkan untuk koordinasi atau perjalanan dalam kota.

Kegiatan operasional pimpinan dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pimpinan balai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi. Paket ini terdiri dari tiga akun belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Keperluan Perkantoran, pembelian konsumsi dalam rangka penerimaan tamu pimpinan, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pimpinan.
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pembiayaan kebutuhan pelaksanaan pimpinan dalam rangka perjalanan dinas luar kota
3. Belanja Sewa, penyediaan kendaraan operasional pimpinan dan kantor sebanyak 3 buah .

Kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu kepegawaian, pengelolaan aset BMN, urusan rumah tangga, dan kegiatan zona integritas (ZI) .

Manfaat Kegiatan:

- Kegiatan operasional pimpinan untuk menunjang tugas dan fungsi Pimpinan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/ PRT/ M/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kegiatan administrasi kesatkeran bermanfaat untuk ketertiban, kelancaran, dan ketelusuran administrasi kesatkeran di lingkungan Satker Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian dan kebutuhan peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai BPLJ.
- Terlaksananya pengelolaan aset BMN dan barang persediaan dengan baik

- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran bagi seluruh pegawai BPLJ
- Terlaksananya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPLJ

Kendala Kegiatan:

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kedua masa pandemik covid-19. Pada kondisi tersebut, diharuskan pertemuan rapat atau diskusi baik teknis ataupun koordinasi yang awalnya dengan rapat offline, saat ini banyak dengan melakukan daring. Kondisi tersebut ditambah dengan kebijakan presiden dengan memberlakukan penerapan kerja dari rumah (WFH) ataupun kerja di kantor (WFO) dari mulai WFO 75% sampai dengan WFO 25% untuk sektor non-esensial tergantung kantor tersebut berada dalam wilayah kategori terdampaknya.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya:

- Banyaknya kegiatan rapat teknis atau koordinasi yang melibatkan pimpinan dengan melakukan daring, sehingga penyerapan anggaran untuk perjalanan dinas dalam, luar kota, bahkan luar negeri menjadi terhambat.
- Dalam penyusunan anggaran operasional pimpinan, Balai mengidentifikasi kebutuhan kendaraan operasional sebanyak 4 buah, akan tetapi yang diizinkan oleh Menteri PUPR hanya sebanyak 3 buah kendaraan, sehingga penyerapan anggaran tidak tercapai sesuai perencanaan.
- Perubahan jadwal WFH dan WFO sesuai surat edaran Sekjen Kementerian PUPR yang mengakibatkan terlambatnya progres pelaksanaan administrasi perkantoran.
- Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai masih dilakukan secara distance learning sehingga kesempatan untuk mendapatkan diklat masih dirasakan kurang optimal untuk setiap pegawai.
- Prasarana mengalami jeda pemeliharaan karena pandemi, dan pemeliharannya disesuaikan dengan sistem kerja masa pandemi. Kondisi awal gedung tidak memiliki *blueprint*, dengan berbagai kerusakan. Banyak perubahan fungsi ruang dan kebutuhan yang berubah karena perubahan struktur dua Balai teknik menjadi satu Balai teknik. Tim pemeliharaan mempunyai keterbatasan terkait keberadaan waktu, manajemen prioritas dan kapasitas SDM.

Alternatif solusi/Pemecahan masalah/Langkah antisipatif:

- Mengoptimalkan dengan pergeseran anggaran di kegiatan yang lebih membutuhkan dan dengan penghematan anggaran. Selain itu, diusahakan setiap kegiatan prioritas

kementerian PUPR yang memerlukan kunjungan lapangan, akan diprioritaskan untuk dilakukan oleh pimpinan.

- Telah dilakukan pelatihan pemahaman mengenai pengelolaan aset BMN dan barang persediaan baik dalam hal teori maupun praktik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kerja.

- Dalam pelaksanaannya tidak seluruh kegiatan sesuai dengan rencana, dikarenakan kebijakan nasional, kondisi dan situasi pandemic Covid 19 yang masih melanda Indonesia, diharapkan kedepan Covid sudah semakin terkontrol sehingga keterlambatan tidak akan terulang.
- Rekonsiliasi yang rutin dilaksanakan oleh Setditjen dengan unit-unit kerja untuk setiap proses usulan administrasi kepegawaian yang menyebabkan proses kepegawaian dapat terlaksana dengan efektif dan tepat waktu
- Perencanaan sarana dan prasarana perkantoran belum secara maksimal tersusun dan terbangun untuk menunjang kegiatan BPLJ, karena tuisi dan kegiatan riil yang telah diterima dan dilaksanakan oleh BPLJ belum tuntas diatur, diuraikan dan ditegaskan batasannya.
- Penganggaran untuk pemeliharaan sar-pras perkantoran belum terencana secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan penentuan kurun waktu untuk pelaksanaan.
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kekurangan tenaga teknis yang terampil dan menguasai mengenai pemeliharaan utilitas (air kotor, air bersih, listrik) dan konstruksi bangunan.
- Pegawai belum seluruhnya mempunyai kesadaran akan pentingnya prasarana yang baik dalam menunjang pekerjaan dan mendorong kelancaran dan kemudahan pekerjaan.
- Kurangnya komitmen nyata organisasi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta belum adanya inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat.
- Kurangnya koordinasi bersama tim kerja Pembangunan ZI sehingga pemantauan terhadap kendala masing-masing Pokja sulit dilakukan.

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

- Pengoptimalan anggaran dan prioritas kegiatan dengan tidak mengurangi kinerja Pimpinan

- Koordinasi, rekonsiliasi untuk setiap proses usulan administrasi kepegawaian dapat terus dilaksanakan baik dengan Setditjen maupun dengan BKO ;
- Untuk menghindari tertundanya kenaikan pangkat, sebaiknya angka kredit para pejabat fungsional diusulkan pada tahun kedua atau tahun ketiga dari masa aktif jabatan fungsionalnya.
- Pelaksanaan pelatihan pemahaman pengelolaan aset BMN dan barang persediaan beserta Aplikasi SAKTI dilakukan lebih awal (pada tahun anggaran), agar petugas BMN dan Persediaan dapat memahami lebih awal mengenai Aplikasi SAKTI sehingga dapat menggunakannya lebih lancar.
- Lebih ditingkatkan lagi kerja sama tim dan kedisiplinan dalam pelaporan.
- Penyusunan road map pengembangan sar-pras, Perhitungan kebutuhan anggaran dan merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rentang jangka pendek, menengah dan panjang sesuai urgensi kebutuhan.
- Pelatihan terhadap personil pelaksana pemeliharaan, serta menghadirkan konsultan individu untuk mengisi kekosongan kebutuhan keahlian dalam bidang teknis yang dibutuhkan.
- Pembentukan organisasi Tim ZI yang lebih efektif dan efisien.
- Koordinasi persiapan Pembangunan ZI bersama tim kerja akan dilaksanakan lebih insentif, sehingga dapat dilakukan pemantauan terhadap kendala masing-masing Pokja.



Gambar 4.6 Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun perbandingan capaian kinerja output beberapa tahun terakhir dan perbandingan realisasi kinerja dengan target renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

No	OUTPUT	SAT	2020*			2021		
			Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
2	ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
3	EAA 005 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100
4	EAC 004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100	1	1	100
5	EAA 002 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100	1	1	100

* RKAKL masih menyatu dengan Satker Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

No	OUTPUT	SAT	Target Renstra 2020-2024	2020*	2021		Capaian Kumulatif
				Realisasi	Target	Realisasi	
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	5	1	1	1	100
2	ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	5	1	1	1	100
3	EAA 005 Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	1	1	100
4	EAC 004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	1	1	1	100
5	EAA 002 Layanan Sarana Internal	Unit	5	1	1	1	100

* RKAKL masih menyatu dengan Satker Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah Balai baru yang terbentuk pada Tahun 2020. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survey melalui

koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Meskipun merupakan Balai yang baru, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tiap tahunnya.

Pada pertengahan tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami reorganisasi dan masih mengalami masa transisi sehingga pada tahun 2020 kesatkeran BPLJ belum terbentuk dan menggunakan anggaran dari Satker Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan balai. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih bergabung dalam LKIP Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan TA 2020. Kondisi pandemi Covid-19 cukup berpengaruh pada pelaksanaan anggaran di tahun 2020 – 2021. Lonjakan kasus pandemi Covid-19 yang terus meningkat pada awal pertengahan tahun 2021 sehingga meniadakan sebagian kegiatan layanan teknis berupa peninjauan atau pengujian di lapangan dan mengutamakan pelayanan teknis melalui diskusi daring. Pandemi mengurangi kegiatan perjalanan dinas yang memperlambat pencapaian kegiatan penerapan dan pengembangan teknologi.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk setiap output dari tahun 2020 – 2021 mencapai angka 100% dengan realisasi capaian output satu dalam 1 tahun anggaran. Realisasi kinerja ini sesuai dengan target renstra setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan melakukan 4 kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi yaitu Implementasi program Backcalc untuk evaluasi struktur perkerasan jalan berbasis website, pengembangan alat ketidakrataan (*Roughness meter*) perkerasan jalan, pengembangan perangkat survei timbang sumbu kendaraan dinamis portable, penyusunan kriteria jalur evakuasi bencana alam, dan juga beberapa layanan dan advis teknis yang terdiri dari Pendampingan Teknis 7 layanan, Pengujian lapangan 3 layanan, dan Kliring Teknologi 1 layanan. Pada 2021, Balai melakukan kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan fungsi balai berupa 12 pengembangan dan penerapan teknologi yang disatukan menjadi satu dokumen rekomendasi kebijakan, serta melakukan 123 kegiatan layanan teknis berupa pendampingan teknis maupun advis teknis untuk internal dan eksternal Kementerian PUPR serta kegiatan layanan teknis PNBPN berupa pengujian sejumlah 19 pengujian.

4.3 Realisasi Anggaran

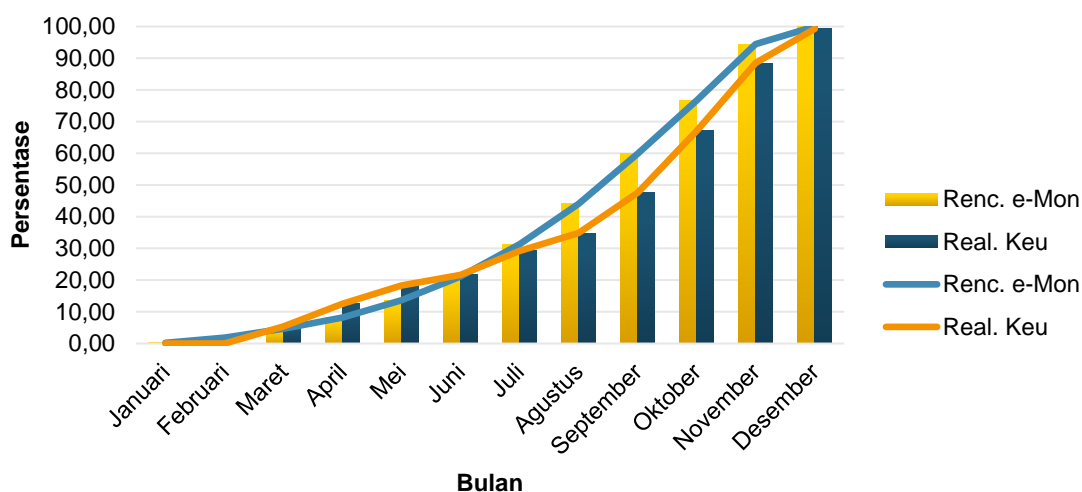
Berdasarkan i-emonitoring PUPR status 18 Januari 2022 PAGU Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah sebesar Rp 9.460.457.000, dengan realisasi sebesar Rp 9.391.455.000 atau menyerap anggaran sebesar 99,27%, sedangkan realisasi fisik sampai akhir tahun anggaran 2021 sudah mencapai nilai 100%. Adapun apabila dibandingkan dengan PAGU Anggaran awal Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 13.477.330, capaian realisasi anggaran hanya sebesar 69,80% dari anggaran PAGU awal. Perbandingan realisasi

anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2021 dapat dilihat pada **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**, sedangkan kurva S capaian fisik dan keuangan dapat dilihat pada **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** dan **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**

Tabel 4.5 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2021

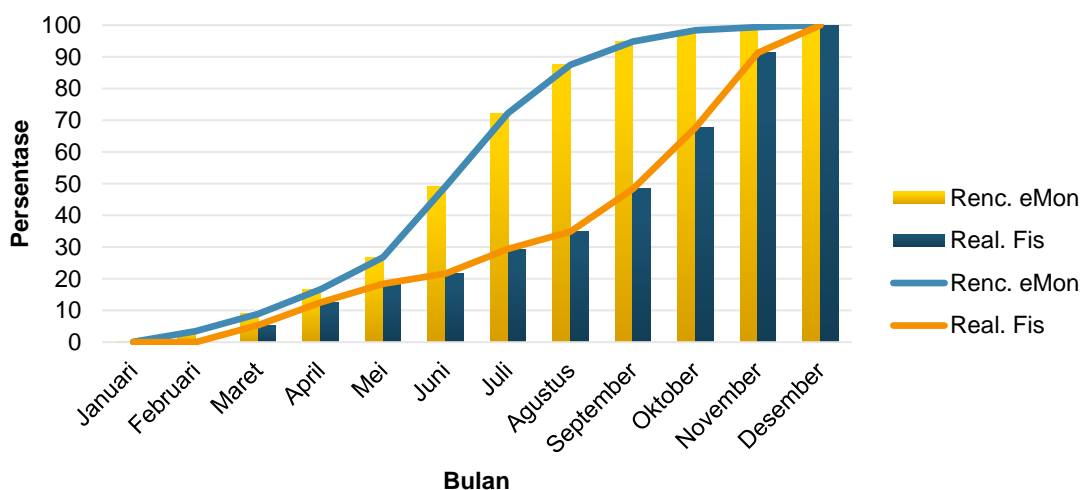
NO	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT		PAGU ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)		REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN		13.477.330	9.460.457	9.391.455	69.68	99.27	
	Rating Keselamatan Jalan Nasional		5.520.751	3.766.295	3.739.959	67.74	99.30	
1	ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.499.336	1.134.021	1.119.706	74.68	98.74	
		Advis dan Layanan Teknis	1.499.336	1.134.021	1.119.706	75	99.54	
2	ABF 007	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	4.021.415	2.632.274	2.620.253	65.16	99.54	
		Pengembangan dan Penerapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan	4.021.415	2.632.274	2.620.253	65.16	99.54	
	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		7.956.579	5.694.162	5.651.496	71.03	99.25	
3	EAA 005	Layanan Perkantoran	1.392.426	1.251.611	1.246.104	89.49	99.56	
		Gaji dan Tunjangan	30.000	30.000	29.683	98.94	98.94	
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.362.426	1.221.611	1.216.421	89.28	99.58	
4	EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	4.718.084	2.327.401	2.290.367	48.54	98.41	
		Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	3.068.084	2.327.401	2.290.367	74.65	98.41	
		Pelayanan Publik (PNBP)	1.650.000	0	0	0	0	
5	EAD 002	Layanan Sarana Internal	1.846.069	2.115.150	2.115.026	114.57	99.99	
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran	1.846.069	2.115.150	2.115.026	114.57	99.99	

Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan



Gambar 4.7 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2021

Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik



Gambar 4.8 Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2021

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) merupakan salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Untuk Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 2 Juni 2020. BPLJ sebelumnya merupakan bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan yang kemudian beralihfungsi menjadi Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dan tiga Balai Teknis. Sehingga pada tahun 2020, unit kesatkeran BPLJ belum dibentuk dan seluruh kegiatan BPLJ pada tahun 2020 masih berada dalam lingkungan kesatkeran Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Perubahan struktur organisasi ini menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas SDM dan sumber daya sarana dan prasarana di Balai. Sampai saat ini Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tidak memiliki aset kendaraan operasional, bangunan dan tanah, serta alat-alat pengujian karena aset yang digunakan merupakan aset yang terdaftar dalam Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Hal ini berpengaruh pada penyerapan anggaran karena dalam perjalanannya dibutuhkan pemeliharaan dan beberapa renovasi terkait bangunan atau gedung yang ditempati serta pemeliharaan alat pengujian maupun kendaraan operasional yang digunakan, menggunakan anggaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Selain itu diperlukan pengadaan unit komputer, alat laboratorium, alat kantor dll yang cukup mempengaruhi kinerja Balai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah unit teknis di lingkungan Ditjen Bina Marga yang memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 67 orang pada tahun 2021 dengan rincian 49 orang PNS dan 18 orang pegawai non PNS. Jumlah SDM ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 56 orang pegawai dengan rincian 41 orang PNS dan 15 orang non PNS. Pertambahan sumber daya manusia ini mempengaruhi hasil kinerja dari Balai karena perlu meningkatkan pengetahuan personil terhadap bidang-bidang di luar kualifikasinya serta menentukan SDM yang kompeten pada bidang terkait untuk menjawab isu-isu yang terjadi.

Selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan melakukan empat kali perubahan anggaran dengan rincian tiga kali refocusing anggaran dan terakhir satu kali optimasi anggaran. Pengurangan anggaran yang dilakukan dimaksudkan untuk memberikan penyerapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Refocusing dan optimasi yang dilakukan umumnya dilakukan dengan meniadakan penggunaan PNBK serta mengurangi kebutuhan anggaran untuk perjalanan dinas. Hal ini dilakukan sebagai implikasi adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Sebagai perbandingan pagu dan realiasi anggaran terkait outcome dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Satker BPLJ TA 2021

Nama Balai	Pagu	Realisasi Anggaran	% Realisasi terhadap DIPA
Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	9.391.455.000	9.391.455.000	99,27%

BAB 5

PENUTUP

5.1 Permasalahan

Pada Tahun 2021, capaian kinerja kegiatan di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2021 mencapai 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,27%. Secara keseluruhan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah berhasil memenuhi target pada Perjanjian Kinerja.

Adapun hambatan dan kendala utama yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2021 tidak lepas dari reorganisasi dan perubahan nomenklatur unit organisasi di Kementerian PUPR secara langsung menyebabkan perlunya penyesuaian bagi unit-unit organisasi di PUPR, termasuk Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan baik yang bersifat teknis maupun administratif. Lebih lanjut akan dijelaskan lebih rinci dan spesifik, sebagai berikut:

- a. Perubahan nomenklatur yang berimplikasi terhadap tata kerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang masih memerlukan penyesuaian praktik pelaksanaannya, terutama dalam hal yang bersifat administratif.
- b. Perencanaan awal dalam Dokumen RKA dan target perjanjian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan belum cukup matang, sehingga pada saat pelaksanaannya perlu beberapa kali perubahan anggaran (revisi DIPA).
- c. Terdapat perubahan kebijakan pimpinan serta kegiatan-kegiatan yang bersifat direktif dari atasan yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan baik dalam melakukan kegiatan maupun penyerapan anggaran yang telah diprogramkan sebelumnya.
- d. Pendistribusian pekerjaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih belum berimbang dikarenakan ketimpangan kuantitas dan keterbatasan kualifikasi terutama dalam bidang keteknisan.
- e. Belum adanya data pembandingan capaian kinerja tahun 2020, sehingga tidak dapat menentukan efektivitas dan efisiensi capaian kinerja saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f. Kondisi pandemi Covid-19 dan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga membuat kegiatan pengumpulan data primer (survei) kegiatan pengembangan dan penerapan menjadi terhambat dan pelaksanaan layanan advis teknik masih mengalami keterbatasan, sehingga penyerapan tidak mencapai target sesuai yang direncanakan.

- g. Adanya penyesuaian pola kerja WFH/WFO secara bergantian menyebabkan tingginya intensitas pemanfaatan sarana komunikasi dalam jaringan (daring) dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, beban kerja SDM menjadi berlebih akibat banyaknya disposisi direktif pimpinan dan undangan pembahasan daring terkait layanan teknis dengan permasalahan yang tipikal (pada level yang belum membutuhkan keterlibatan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan).

5.2 Rekomendasi

Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan agar kendala yang dihadapi tahun ini tidak terulang pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Penajaman kembali nomenklatur balai dengan prosedur kerja yang lebih rinci sesuai lingkungan balai, dengan sistem monitoring pelaksanaannya yang lebih baik dan dievaluasi secara berkala sehingga update dan penginputan data pada e-monitoring menghasilkan data yang akurat dan handal.
- b. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Perlu dipastikan Kembali Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Rencana Strategis, sehingga meminimalisir perubahan anggaran (revisi DIPA).
- c. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu diadakan secara intensif kegiatan-kegiatan antara lain: in house training; Pendidikan dan pelatihan; vokasi maupun pemerataan kualifikasi SDM teknis; serta penggunaan tenaga bantuan pihak luar yang berkompeten pada bidang terkait di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- d. Mengefektifkan pembentukan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang merupakan penugasan direktif pimpinan, sehingga pembahasan terkait permasalahan teknis lapangan dilakukan oleh tim/personil yang benar-benar kompeten.
- e. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- f. Melakukan inovasi pola kerja sebagai langkah penyesuaian dengan kondisi Covid-19, kegiatan pengumpulan data sekunder melalui koordinasi antar instansi/lembaga/pemerintah daerah sambil menunggu waktu pelaksanaan survei yang kondusif.

- g. Perlunya pemetaan permasalahan-permasalahan teknis untuk penentuan prioritas layanan yang lebih membutuhkan peran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Penentuan prioritas layanan ini dilakukan sebagai langkah preventif, sehingga kondisi-kondisi lapangan yang berpotensi terjadi kesalahan dapat dideteksi sedini mungkin.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan akan terus menerus meningkatkan komitmen dan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungannya. Penerapan SAKIP yang baik akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada jajaran aparat Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga guna mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 dapat menjadi masukan atau umpan balik bagi peningkatan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga di tahun yang akan datang. Satuan Kerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan diharapkan dapat menyusun rencana kinerja yang lebih baik dan dapat mengantisipasi permasalahan potensial yang mungkin terjadi.

Akhir kata, Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2021 ini diharapkan menjadi laporan kinerja yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik di dalam lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan maupun di luar lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, serta dapat menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja ke depan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal 2021
2. Perjanjian Kinerja Revisi 2021
3. Data Catatan Kaki Laporan Kinerja
4. Dokumentasi

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Awal 2021



Jembatan
Teluk Kendari

Jembatan Gantung
Pasia - Kelok

Jalan Tol
Kertosono - Mojokerto

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI
Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 2021

PIHAK PERTAMA


NENI KUSNIANTI



PIHAK KEDUA


HEDY RAHADIAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100 %	100 %
	Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen
	Rincian Output		
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan		1 Rekomendasi Kebijakan
ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan		1 Rekomendasi Kebijakan	

Kegiatan :

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp

13.477.330.000

Bandung, Januari 2021

Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



Neni Kusnianti
Neni Kusnianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							13,477,330	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						5,520,751	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional						
		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana					5,520,751	
		<i>Bidang Jalan dan Jembatan</i>	<i>1 Rekomendasi Kebijakan</i>				1,499,336	
		001		404	<i>Advis dan Layanan Teknis</i>		1,499,336	
			1 Dokumen		<i>Layanan Teknis Bidang PE Perkerasan dan LInggungan Jalan</i>	Bandung	1,499,336	
		<i>Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan</i>	<i>1 Rekomendasi Kebijakan</i>				4,021,415	
		007		410	<i>Pengembangan dan Penerapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan</i>		4,021,415	
			1 Dokumen		PA <i>Pengembangan Teknologi Bidang Perkerasan Jalan</i>	Bandung	4,021,415	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						7,956,579	
		Tingkat Dukungan Manajemen						
		Layanan Perkantoran					1,392,426	
		005 <i>Layanan Perkantoran</i>	<i>1 Layanan</i>				1,392,426	
				001	<i>Gaji dan Tunjangan</i>		30,000	
			1 Tahun		PH <i>Belanja Uang Lembur</i>	Bandung	30,000	
				002	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>		1,362,426	
			1 Tahun		<i>Pemeliharaan Gedung PI Kantor, Sarana dan Prasarana</i>	Bandung	830,946	
			1 Tahun		PJ <i>Operasional Perkantoran</i>	Bandung	531,480	
		Layanan Umum					4,718,084	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Layanan Dukungan 004 Manajemen Satker	1 Layanan				4,718,084	
				055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			3,068,084	
			1 Laporan		PK Administrasi Kesatkeran	Bandung	202,374	
			1 Laporan		PL Operasional Pimpinan	Bandung	807,363	
			1 Laporan		P M Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bandung	2,058,347	
				346 Pelayanan Publik (PNBP)			1,650,000	
			1 Layanan		PB Layanan PNBP	Bandung	1,650,000	
		Layanan Sarana Internal					1,846,069	
		002 Layanan Sarana Internal	1 Unit				1,846,069	
				053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			1,846,069	
			1 Paket		PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	1,846,069	

LAMPIRAN 2

Perjanjian Kinerja Revisi 2021



Jembatan
Teluk Kendari

Jembatan Gantung
Pasia - Kelok

Jalan Tol
Kertosono - Mojokerto

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN REVISI



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI
Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, November 2021

PIHAK KEDUA

HEDY RAHADIAN

PIHAK PERTAMA

NENI KUSNIANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020		Target 2021	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional				
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100	%	100	%
	Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00	%	100,00	%
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen
	Rincian Output				
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	-	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	-	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan	

Kegiatan :

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp

9.460.457.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Bandung, November 2021
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan


Neni Kusnianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
							(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							9.460.457	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						3.766.295	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional						
		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana					3.766.295	
		Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan				1.116.181	
				404 Advis dan Layanan Teknis			1.116.181	
			1 Dokumen		PE Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	1.116.181	
		007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan				2.650.114	
				Pengembangan dan Penerapan 410 Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan			2.650.114	
			1 Dokumen		PA Pengembangan Teknologi Bidang Perkerasan Jalan	Bandung	2.650.114	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen						5.694.162	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
		Layanan Perkantoran					1.251.611	
		005 Layanan Perkantoran	1 Layanan				1.251.611	
				001 Gaji dan Tunjangan			30.000	
			1 Tahun		PH Belanja Uang Lembur	Bandung	30.000	
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.221.611	
			1 Tahun		PI Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	878.681	
			1 Tahun		PJ Operasional Perkantoran	Bandung	342.930	
		Layanan Umum					2.327.401	
		004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan				2.327.401	
				055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			2.327.401	
			1 Laporan		PK Administrasi Kesatkeran	Bandung	210.482	
			1 Laporan		PL Operasional Pimpinan	Bandung	331.166	
			1 Laporan		PM Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bandung	1.785.753	
				346 Pelayanan Publik (PNBP)			0	
			1 Layanan		PB Layanan PNBP	Bandung	0	
		Layanan Sarana Internal					2.115.150	
		002 Layanan Sarana Internal	1 Unit				2.115.150	
				053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			2.115.150	
			1 Paket		PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	2.115.150	

LAMPIRAN 3

Data Catatan Kaki Laporan Kinerja

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2021
SATUAN KERJA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(7)/100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
												13.477.330	9.460.457	9.391.455	69,68	99,27	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					100						5.520.751	3.766.295	3.739.959	67,74	99,30	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional															
		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				100						5.520.751	3.766.295	3.739.959	67,74	99,30	
		ABF Layanan Ketechnikan Bidang Jalan 001 dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100	100	100				1.499.336	1.134.021	1.119.706	74,68	98,74	
						100			404	Advis dan Layanan Teknis		1.499.336	1.134.021	1.119.706	74,68	98,74	
			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100		Layanan Teknis Bidang PE Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	1.499.336	1.134.021	1.119.706	74,68	98,74	
		ABF Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan 007 Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100	100	100				4.021.415	2.632.274	2.620.253	65,16	99,54	
						100				Pengembangan dan Penerapan 410 Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan		4.021.415	2.632.274	2.620.253	65,16	99,54	
			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100		PA Pengembangan Teknologi Bidang Perkerasan Jalan	Bandung	4.021.415	2.632.274	2.620.253	65,16	99,54	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen					100						7.956.579	5.694.162	5.651.496	71,03	99,25	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR															
		Layanan Perkantoran				100						1.392.426	1.251.611	1.246.104	89,49	99,56	
		EAA 005 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	100	100				1.392.426	1.251.611	1.246.104	89,49	99,56	
									001	Gaji dan Tunjangan		30.000	30.000	29.683	98,94	98,94	
			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	100	100		PH Belanja Uang Lembur	Bandung	30.000	30.000	29.683	98,94	98,94	
									002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.362.426	1.221.611	1.216.421	89,28	99,58	
			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	100	100		Pemeliharaan Gedung PI Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	830.946	915.851	915.174	110,14	99,93	
			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	100	100		PJ Operasional Perkantoran	Bandung	531.480	305.760	301.247	56,68	98,52	
		Layanan Umum				100						4.718.084	2.327.401	2.290.367	48,54	98,41	
		EAC Layanan Dukungan Manajemen 004 Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	100	100				4.718.084	2.327.401	2.290.367	48,54	98,41	
									055	Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		3.068.084	2.327.401	2.290.367	74,65	98,41	
			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	100	100		PK Administrasi Kesatkeran	Bandung	202.374	201.935	198.054	97,87	98,08	
			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	100	100		PL Operasional Pimpinan	Bandung	807.363	331.166	329.194	40,77	99,40	
			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	100	100		Pelayanan Umum, PM Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bandung	2.058.347	1.794.300	1.763.119	85,66	98,26	
									346	Pelayanan Publik (PNBP)		1.650.000	0	0			
			1 Layanan	-	-	100	0	0		PB Layanan PNBP	Bandung	1.650.000	0	0	0,00	0,00	Paket dihilangkan
		Layanan Sarana Internal				100						1.846.069	2.115.150	2.115.026	114,57	99,99	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(7)/100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
		EAD 002 Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100				1.846.069	2.115.150	2.115.026	114,57	99,99	
									053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			1.846.069	2.115.150	2.115.026	114,57	99,99	
			1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100		PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	1.846.069	2.115.150	2.115.026	114,57	99,99	

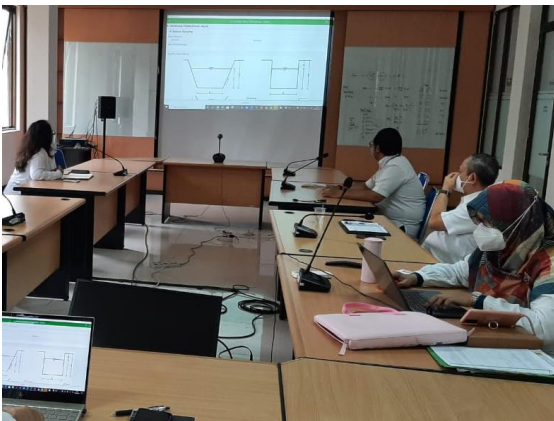
LAMPIRAN 4

Dokumentasi

Dokumentasi Kegiatan Layanan Teknis



Dokumentasi Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi



Dokumentasi Layanan Perkantoran



Paket Perbaikan Pelataran Parkir Motor dan Trotoar



Paket Perbaikan Dinding dan Kelistrikan



Paket Pemeliharaan Gedung Balai dan Laboratorium

Dokumentasi Layanan Dukungan Manajemen Satker



Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan

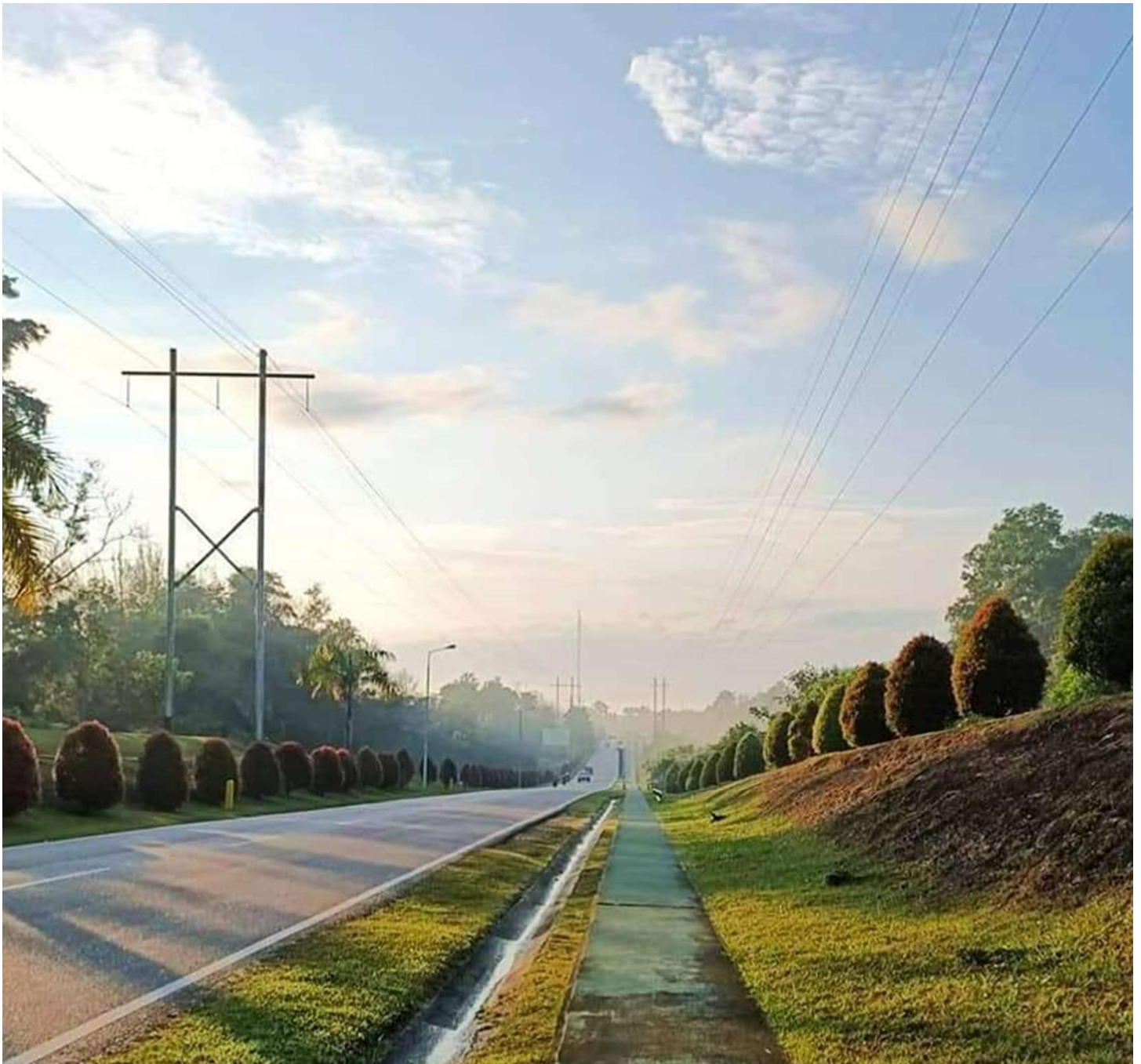
Dokumentasi Layanan Sarana Internal



Paket Renovasi Lantai Workshop, Toilet dan Mushola



Pengadaan Barang Perkantoran



**BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**